

PERKEMBANGAN ISLAM DI BULUKUMBA 2000-2005

(Studi Historis Penerapan Perda Syariat Islam)



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar
Sarjana Humaniora Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam
pada Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar

Oleh

Muliadi

NIM. 40200113057

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Muliadi
NIM : 40200113057
Tempat/tgl.Lahir : Balleanging 12 Desember 1993
Jur/Prodi/Konsentrasi : Sejarah dan Kebudayaan Islam/S1
Fakultas/program : Adab dan Humaniora
Alamat : Jl. Andi Tonro Makassar
Judul : Perkembangan Islam Di Bulukumba (Studi
Historis Penerapan Perda Syariat Islam 2000-
2005).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Gowa, 09, September 2019

Penulis,

Muliadi

NIM: 40200113057

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Perkembangan Islam di Bulukumba 2000-2005 (Studi Historis Penerapan Perda Syariat Islam)”, yang disusun oleh Saudara Muliadi NIM: 40200113057, Mahasiswa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar.

Gowa, 09 September 2019 M.
09 Muharram 1441 H.

Dewan Penguji

1. Ketua : H. M. Nur Akbar Rasyid, M. Pd., M. Ed., Ph. D. (...)
2. Sekretaris : Dr. Abu Haif, M. Hum. (...)
3. Penguji I : Dr. Wahyuddin G, M. Ag (...)
4. Penguji II : Dra. Hj. Surayah, M. Pd. (...)
5. Pembimbing I : Dr. Rahmat, M. Pd. I. (...)
6. Pembimbing II : Dr. Rahmawati, MA. (...)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar



Dr. Hasvin Haddade, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19750804 200112 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terucap kepada Nabi Muhammad saw, yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir. Dengan penuh rasa hormat, pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku Bahtiar dan (alm) Hawise, serta seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moral maupun materil.

Sepanjang penyusunan skripsi ini begitu banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis memghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi senua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga seesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr.Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektot UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ruang kepada ruang kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Peradaban ini.
2. Bapak Dr. H. Barsihannor, M.Ag., Sebagai Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar beserta jajaran bapak/ibu Wakil Dekan, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami selama dalam proses perkuliahan sampai menyelesaikan studi.

3. Bapak Dr. Rahmat, M.Pd.I. dan Ibu Dra. Rahmawati, Ma., Ph.D., sebagai pembimbing pertama dan kedua, yang telah meluangkan waktu dan penuh perhatian memberikan bimbingan, petunjuk serta saran-saran yang sangat membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Dr. Wahyuddin G, M. Ag dan Ibu Dra. Hj. Surayah, M. Pd. Sebagai penguji pertama dan kedua, yang telah memberikan saran-saran yang sangat membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Drs. Rahmat, M.Pd.I. dan Drs. Abu Haif, M.Hum. Sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, Atas Kearifan dan Ketulusan serta banyak memberikan arahan dan motivasi akademik.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak berinteraksi kepada kami dalam proses perkuliahan di Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam.
7. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Khususnya angkatan 2013 terima kasih atas perjuangan dan kebersamaannya serta bantuannya selama penyusunan Skripsi.
8. Kakanda, teman-teman serta adinda IKAMANTA (Ikatan Alumni MAN Tanete) Bulukumba terima kasih atas semua doa dan dukungannya.
9. Kakanda, teman-teman dan adinda di UKM KSR PMI Unit 107 UIN Aauddin Makassar terima kasih atas segala doa serta dukungannya kepada penuis.
10. Teman-teman KKN angk.54 Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, terima kasih atas doa dan dukunganya selam penyusuna Skripsi ini.

10. Terakhir kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya memperlancar penulisan skripsi ini.

Sebagai insan biasa yang tak luput dari kesalahan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan kedepan.

Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, besar harapan jika skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin

Billahi taufik wal hidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Gowa,

Penulis,

MULIADI

ABSTRAK

Nama Penyusun : Muliadi

NIM : 40200113057

Judul Skripsi : Perkembangan Islam di Bulukumba 2000-2005

(Studi Historis Penerapan Perda Syariat Islam)

Skripsi ini adalah studi tentang perkembangan Islam periode penerapan perda syariat Islam di Bulukumba 2000-2005. Ada tiga submasalah penelitian ini: 1) Bagaimana kondisi masyarakat Bulukumba sebelum penerapan syariat Islam 2000-2005 2) Bagaimana kebijakan penerapan perda syariat Islam di Bulukumba tahun 2000-2005 3) Bagaimana hasil penerapan syariat Islam di Bulukumba 2000-2005.

Penelitian ini menggunakan penelitian historis. Data yang digunakan adalah data kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library reseach*). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan historis, pendekatan agama, pendekatan politik, dan pendekatan sosiologis. Adapun langkah-langkah penelitian ini yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang: 1) kondisi masyarakat Bulukumba sebelum penerapan Perda Syariat Islam yaitu dimana masyarakatnya mengalami kemerosotan moral contohnya: pemerkosaan, penganiayaan berat, pembunuhan, serta perilaku yang menyimpang contohnya perjudian, narkoba, pencurian. 2) kebijakan penerapan perda Syariat Islam yaitu pemerintah mensosialisasikan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keberagaman berdasarkan Syariat Islam, serta membentuk aturan dalam penerapan perda Syariat Islam. 3) dampak penerapan perda Syariat Islam yaitu terbentuknya Kelurahan Muslim, terbentuknya Kelurahan pelopor zakat, serta menurunnya tingkat kriminalitas.

Penerapan Perda Syariat Islam di Bulukumba dapat dipelopori oleh pemerintahan Andi Patabai Pabokori (Bupati Bulukumba tahun 1995-2005) serta keinginan dari masyarakat itu sendiri. Penerapan Perda Syariat Islam di Bulukumba dapat menerapkan empat peraturan daerah yakni : Perda Nomor 03 Tahun 2002, tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol. Perda Nomor 02 Tahun 2003, Tentang pengelolaan zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah, Perda Nomor 05 Tahun 2003, tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah. Perda Nomor 06 Tahun 2003, tentang Pandai Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan calon Pengantin.

Keterlibatan secara langsung Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam pembinaan serta pengembangan Syiar Islam, selain merupakan suatu amanah dari Allah swt selaku pemimpin, juga menjadi suatu komitmen kemasyarakatan untuk membangun kembali semangat keagamaan di tengah masyarakat Bulukumba.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	10-23
A. Hukum Islam	10
1. Pengertian Hukum Islam	10
2. Hukum Islam Menurut Para Ahli	12
B. Konsep Penegakan Syariat Islam di Indonesia	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23-28
A. Jenis Penelitian	23
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Sumber Data	26

D. Langkah-langkah Pengumpulan Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29-62
A. Kondisi Masyarakat Bulukumba Sebelum Penerapan Syariat Islam.	29
1. Masuknya Islam di Bulukumba.....	29
2. Perkembangan Islam di Bulukumba	32
3. Kebijakan Pemerintah Sebelum Penerapan Perda Syariat Islam .	37
B. Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Perda Syariat Islam	40
1. Mensosialisasikan Keutamaan dasar untuk Meningkatkan Syariat Islam.....	40
2. Membentuk aturan dalam Penerapan Perda Syariat Islam	46
C. Hasil-hasil yang dicapai dalam Penerapan Perda Syariat Islam	58
1. Terbentuknya Kelurahan Muslim.....	58
2. Terbentuknya Kelurahan Pelopor Zakat	59
3. Menurunnya Tingkat Kriminalitas	62
BABV PENUTUP	63-64
A. Kesimpulan	63
B. Implikasi	63
DAFTAR PUSTAKA	65-67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
RIWAYAT HIDUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai aneka suku, budaya, bahasa, ras, agama dan kepercayaan. Perbedaan tersebut telah menciptakan paradigma dari berbagai komponen masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi pada bangsa ini.¹

Pada babak ini proses da'wah (Islamisasi) di Indonesia mempunyai ciri terjadinya globalisasi informasi dengan pengaruh-pengaruh gerakan Islam internasional secara efektif yang akan membangun kekuatan Islam lebih utuh yang meliputi segala dimensinya. Sebenarnya kalau saja Indonesia tidak terjajah maka proses Islamisasi di Indonesia akan berlangsung dengan damai karena bersifat kultural dan membangun kekuatan secara struktural. Hal ini dikarenakan awal masuknya Islam yang secara manusiawi, dapat membangun martabat masyarakat yang sebagian besar kaum sudra (kelompok struktur masyarakat terendah pada masa kerajaan) dan membangun ekonomi masyarakat. Sejarah membuktikan bahwa kota-kota pelabuhan (pusat perdagangan) merupakan kota-kota yang perekonomiannya berkembang baik adalah kota-kota muslim. Dengan kata lain Islam di Indonesia bila tidak terjadi penjajahan akan merupakan wilayah Islam yang terbesar dan terkuat. Walaupun demikian Allah mentakdirkan di Indonesia merupakan jumlah penduduk muslim terbesar didunia, tetapi masih menjadi tanda tanya besar apakah kualitasnya sebanding dengan kuantitasnya.²

¹Muhammad Zein, ed., *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas* (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 237.

²M. Abdul Karim, *Islam Nusantara* (Cet.1; Yogyakarta: Pustaka Book Publisher), h. 5.

Disamping itu, salah satu bukti bahwa Islam akan tetap berjaya adalah muncul dan berkembangnya Islam di Indonesia yang telah menjadi bukti sejarah bagi bangsa Indonesia dimana peranannya sangat besar terhadap perjuangan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.³

Dinamika selanjutnya, kesejahteraan ummat Islam senantiasa memegang peranan penting. Islam memberikan spirit bagi tumbuh dan berkembangnya bangsa ini. Nilai-nilai Islam yang berdasarkan Al-qu'an dan Sunnah Nabi serta pengembangannya dengan ijtihad. Peranan penting itu paling tidak tampak terlihat dalam perjuangan melawan hegemoni kolonial dan saat mengisi kemerdekaan. Islam di Indonesia memang bukanlah sebagai agama negara yang ajarannya dapat dijadikan sebagai hukum negara, tetapi Islam mampu melakukan proses sublimisasi, sehingga nilai-nilainya meresap dalam setiap perilaku anak bangsanya dan dijadikan modal untuk membangun negeri ini.⁴

Wacana penerapan syariat Islam telah muncul sejak negara ini hendak diproklamasikan pada tahun 1945. Wacana penerapan syariat Islam disuarakan oleh para pejuang *Islam Santri* tetapi selalu mendapatkan penentangan dari para pejuang *Islam Nasionalis*. Ada dua cara yang digunakan yaitu secara politis melalui partai politik dan secara illegal melalui perlawanan bersenjata, tetapi semuanya gagal. Wacana penerapan syariat Islam kembali menemukan momentum ketika Orde Baru (ORBA) jatuh 21 Mei 1998 dan UUD 1945 diamandemen. Kesempatan ini juga digunakan oleh masyarakat kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan untuk

³Beti yunardi Posha, "Perkembangan Islam Pasca Kemerdekaan" *Historia* 3, no 2 (2015) :h. 75.

⁴M. Abdul Karim, *Islam Nusantara* (Cet.1; Yogyakarta: Pustaka Book Publisher), h. 6.

menerapkan syariat Islam seperti yang pernah dikembangkan pada dekade 1940-an hingga 1960-an oleh DI/TII. Dari hasil kongres yang dilakukan beberapa ormas Islam dan pemerintah daerah menghasilkan empat Perda bernuansa syariat Islam di antaranya Perda Miras, Zakat, Baca-tulis al Qur'an dan Busana Muslimah.⁵

Penerapan Syariat Islam melalui Peraturan Daerah telah menjadi populer di tiap daerah kabupaten. Apalagi di kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kemerosotan moral serta perilaku-perilaku menyimpang menjadi salah satu alasan dalam upaya penegakan Syariat Islam. Diantara sekian kabupaten di Sulawesi Selatan, Bulukumba adalah salah satu kabupaten yang cukup terkenal dalam penerapan syariat islam melalui peraturan daerah. Orde reformasi setidaknya memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk memperjuangkan cita-citanya. Di Sulawesi Selatan sendiri, dalam upaya penerapan syariat islam melalui peraturan daerah memerlukan perjuangan yang panjang.⁶

Di Kabupaten Bulukumba sendiri, perjuangan untuk mewujudkan Syariat Islam melalui Peraturan Daerah (Perda) tidaklah mudah. Ada banyak elemen yang terlibat dan tidak sedikit juga hambatan yang menghadang. Patabai Pabokori (Mantan Bupati Bulukumba) dalam tuturannya sebagai berikut:

“Perda Syariat Islam yang empat itu sebenarnya keinginan dari umat Islam di Bulukumba. Jadi ketemu antara keinginan dari bawah dan keinginan pemerintah, sehingga diramulah dan dibuatlah Perda Syariat Islam dan ternyata mendapat sambutan dari anggota DPRD Bulukumba, karena bagaimanapun eksekutif berjuang kalau tidak mendapat respon dari anggota DPRD kan itu menghambat. Kemudian yang kedua kami banyak mendapat dukungan dari Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI), juga Jundullah yang

⁵Ashadi L. Diab “Peranan Perda Bernuansa Syariat Islam” (Kajian Tentang Penerapan Perda Bernuansa Syariat Islam dan Implikasinya Terhadap Hubungan antar agama di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi-Selatan), *Historia* Vol. 7 no.3 (2006), h. 1.

⁶Andi Mannaungi, “Peranan Perda Syariat Islam Dalam Upaya Menanggulangi Perilaku Penyimpangan Remaja Di Kelurahan Borong Rappoa kabupaten Bulukumba” *Skripsi* (Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2013), h. 2.

saat itu gencar gerakannya. Pada saat itu kami buat konsep perda dan itulah yang memberikan dorongan, motivasi dan tekanan pada DPRD Bulukumba sehingga cepat proses pengesahannya.....”

Pernyataan mantan Bupati Bulukumba di atas menegaskan bahwa perjuangan penerapan Syariat Islam melalui Perda berasal dari bawah dalam artian memang benar-benar keinginan rakyat Bulukumba dan berbagai elemen masyarakat yang memang berjuang seperti KPPSI dan Jundullah sehingga pada akhirnya mendapat sambutan dari DPRD Bulukumba. Walau demikian, tidak sedikit juga polemik yang terjadi setelah diberlakukannya Perda Syariat Islam di Kabupaten Bulukumba. Seperti uraian M Fadhly Ase, SHI :

“Perda-perda syariat tersebut, dengan alasan dan argumentasi masing-masing, telah menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam kalangan umat Islam sendiri. Sehingga harus benar-benar dicermati bagaimana menyikapi keinginan umat Islam terhadap tuntutan pelaksanaan syari”at Islam secara formal....”⁷

Setelah pemberlakuan empat perda tersebut tahun 2003 lalu, Bulukumba telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dimana masjid-masjid kian hidup oleh ramainya jama’ah, beberapa fasilitas perkantoran serta sekolah lebih bernuansa Islami karena dilengkapi dengan kaligrafi al-Qur’an, seluruh siswa-siswi beserta guru-guru yang beragama Islam memakai busana muslim dan muslimah.

Bahkan dalam penelitian Lukman bin Ma’sa yang berjudul “Penerapan Syariat Islam Melalui Peraturan Daerah” menjelaskan tentang sebelum memberlakukan empat perda tersebut, 30 persen penduduk Bulukumba buta aksara Al-Qur’an, angka kriminalitas, kenakalan remaja, dan penyimpangan sosialpun sangat tinggi. Namun setelah mencanangkan diri sebagai kabupaten yang

⁷Andi Mannaungi, “Peranan Perda Syariat Islam Dalam Upaya Menanggulangi Perilaku Penyimpangan Remaja Di Kelurahan Borong Rappoa kabupaten Bulukumba” *Skripsi* (Makassar Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2013), h. 3.

menerapkan syariat Islam, angka 30 persen tersebut dapat didongkrak menjadi 100 persen bisa baca Al-Qur'an dan tingkat kriminalitas menurun hingga 80 persen.⁸

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, dapat dirumuskan pokok masalah yaitu “Bagaimana perenapan Perda Syariat Islam di Bulukumba 2000-2005?” Dari permasalahan pokok tersebut maka dapat dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi masyarakat Bulukumba sebelum penerapan Perda Syariat Islam 2000-2005?
2. Bagaimana kebijakan penerapan Perda Syariat Islam di Bulukumba 2000-2005?
3. Bagaimana dampak penerapan Perda Syariat Islam di Bulukumba 2000-2005?

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan pengumpulan data dan interpretasi data.⁹

Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam lapangan penelitian banyak gejala yang meyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas,

⁸Lukman bin Ma'sa, “ Penerapan Syari'at Islam Melalui Peraturan Daerah” Studi Kasus Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan”. *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ilmu Dakwah Sekolah Tinggi Ilmu Da'wah (STID) Mohammad Natsir , 2007), h. 7.

⁹*Pedoman Penulisan Skripsi. Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2016), h.13-14.

namun tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas kita teliti semua. untuk menentukan pilihan penelitian maka harus membuat batasan yang dinamakan fokus penelitian.¹⁰

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah hasil-hasil yang dicapai dalam penerapan perda Syariat 2000-2005, baik menyangkut terbentuknya kelurahan muslim, terbentuknya kelurahan pelopor zakat maupun menurunnya tingkat kriminalitas. Sebelum pembahasan fokus tersebut juga dibahas kondisi masyarakat Bulukumba sebelum penerapan syariat Islam, baik masuknya Islam di Bulukumba, perkembangan Islam di Bulukumba, maupun kebijakan pemerintah sebelum penerapan perda Syariah.

2. Deskripsi Fokus

Subjek penelitian ini adalah pemerintah kabupaten Bulukumba yang dapat dipelopori oleh bapak Patabai Pabokori yang menjabat sebagai bupati pada saat itu. Perda syariat Islam terbentuk tahun 2000-2005, dimana dalam pembentukan perda ada banyak elemen yang terlibat didalamnya, semenjak diberlakukannya Perda Syariat Islam di Kabupaten Bulukumba tahun 2000-2005 dapat menetapkan empat peraturan daerah yaitu Perda Nomor 03 tahun 2003 tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman keras, Perda Nomor 02 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat profesi, infaq dan shadaqah, Perda Nomor 05 tahun 2003 tentang pakaian muslim dan muslimah, Perda Nomor 06 tahun 2003 tentang pandai baca Tulis Al-Quran bagi siswa dan calon pengantin, serta dapat menetapkan kelurahan Muslim, kelurahan pelor zakat serta dapat mengurangi tingkat kriminalitas yang sering terjadi di Kabupaten Bulukumba.

¹⁰“Menentukan Fokus Penelitian”, *Wrodpress.com* ,<https://wajburni.wordpress.com/2012/02/01/menentukan-fokus-penelitian/> (29 November 2016).

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang bertujuan memandu peneliti dalam rangka menentukan sikap dari aspek ketersediaan sumber, baik berupa hasil-hasil penelitian maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Jika tersedia sumber berupa hasil penelitian maka peneliti harus mampu menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang akan dihasilkan. Jika peneliti hanya menemukan literatur-literatur, maka peneliti harus menuliskan judul dan penulis buku tersebut diikuti dengan inti sari buku tersebut yang ada kaitannya dengan topik atau permasalahan yang akan diteliti.¹¹ Ada beberapa hasil penelitian yang nantinya akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Dalam sebuah jurnal yang berjudul “Perkembangan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan” (2015) yang ditulis oleh Beti Yanury Posha, S.Pd., M.Hum, yang membahas tentang perkembangan Islam Indonesia pasca kemerdekaan.
2. Dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Perda Syariat Islam Dalam Upaya Menanggulangi Perilaku Penyimpangan Remaja Di Kelurahan Borong Rappoa Kabupaten Bulukumba” (2013) yang ditulis oleh Andi Mannaungi yang membahas tentang bagaimana upaya menanggulangi penyimpangan remaja dalam penerapan perda Syariat Islam, yang dimana Borong Rappoa ini tidak termasuk dalam salah satu desa percontohan.
3. Dalam Skripsi Lukman Bin Ma’sa dengan judul “Penerapan Syari’at Islam melalui Peraturan Daerah” (2007) (Studi Kasus Desa Padang Kec.

¹¹*Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2016), h. 14.

Gantarang Kab Bulukumba Sulawesi Selatan), yang membahas tentang penerapan dan penegakan Perda Syariat Islam.

4. Dalam buku yang di tulis oleh Marus Andis dengan judul “Mengawal Bulukumba Ke Gerbang Syariat Islam” (2014) yang menjelaskan tentang sejarah penerapan PERDA Syariat Islam di Bulukumba.
5. Dalam tesis yang ditulis oleh Amril Maryolo, dengan judul “Formalisasi Syariat Islam di Bulukumba (Studi Tentang Peraturan Daerah Keagamaan)” (2017) yang menjelaskan tentang implementasi perda keagamaan.

Dari beberapa literatur di atas peneliti belum menemukan tulisan ataupun hasil penelitian yang membahas secara khusus mengenai *Perkembangan Islam di Bulukumba 2000-2005 (Studi Historis Penerapan Perda Syariat Islam)* sehingga peneliti menarik untuk dikaji.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari beberapa permasalahan yang telah dibahas di atas, maka penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi masyarakat Bulukumba sebelum penerapan Perda Syariat Islam di Bulukumba tahun 2000-2005.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem penerapan Perda Syariat Islam di Bulukumba tahun 2000-2005.
- c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil yang dicapai dalam penerapan Perda Syariat Islam dalam di Bulukumba tahun 2000-2005.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terkhusus pada bidang ilmu pengetahuan Sejarah dan Kebudayaan Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian ke depannya yang dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam mengkaji suatu sejarah khususnya ketika berkaitan dengan kausalitas kejatuhan Dinasti Umayyah terhadap diaspora umat Islam, yang lebih mendalam dan untuk kepentingan ilmiah lainnya.

Penelitian ini pula diharapkan dapat berguna bagi para sejarawan dan masyarakat umum untuk menjadi referensi atau sebagai bahan acuan dalam penulisan sejarah khususnya dalam mengetahui lebih dalam lagi bagaimana perkembangan Islam di Bulukumba (studi historis penerapan syariat Islam pasca proklamasi).

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum dalam pandangan para ilmuwan muslim adalah suatu aspek praktis doktrin sosial serta keagamaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Bagi ummat Islam generasi pertama, mereka hampir tidak bisa membedakan antara sesuatu yang bersifat legal dan sesuatu yang bersifat keagamaan. Di dalam al-Quran dan al-Sunah kedua hal ini sangat berkaitan dan berhubungan, namun dalam perkembangan selanjutnya dapat dibedakan juga antara pengkajian keagamaan (kalam, ushuluddin, teologi), pengkajian legal (fiqh, yurisprudensi). Barulah pada perkembangan terakhir kata Qanun dipakai untuk menunjukan aturan administratif yang berbeda dari hukum yang berasal dari wahyu atau syariah.

Islam adalah ajaran Allah saw, yang terstruktur sebagai agama terakhir. Substansi ajarannya ialah mencakup segala aktifitas manusia di atas permukaan bumi. Dan karenanya manusia diserukan untuk berlaku baik sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Dalam formalitas kehidupan lahiriyah, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan penciptaNya, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Disinilah adanya ketentuan-ketentuan atau norma-norma (hukum) guna membatasi perilaku-prilaku manusia agar tidak sewenang-wenang.¹

Menjelaskan pengertian Hukum Islam dengan memahami rangkaian kata yang membangunnya yakni kata Hukum dan Islam. Kata-kata Hukum Islam

¹H.A.R Gibb, *Mohammedanism* (New York : Oxford University Press, 1962), h. 90.

dalam khazanah fiqh Islam dan dalam Al Quran dan sunnah tidak ditemui. Hukum Islam hanya dikenal dalam bahasa Indonesia, sudah terpakai dan familiar. Untuk memahami pengertian Hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu pengertian hukum secara sederhana, yaitu: Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila dikaitkan dengan definisi hukum ini dengan Islam atau syara', maka Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.

Pengertian hukum Islam dalam konteks sistem hukum Islam adalah berkisar tentang kaidah yang dikenal dengan *Ahkamul Khomsah* (lima penggolongan hukum). *Ahkamul khomsah* tersebut meliputi hukum haram, wajib, mubah, makruh dan sunah. Penggolongan kategori hukum tersebut lebih sering dipakai dalam terminologi fiqh Islam. Mislanya hukum sholat 5 waktu adalah wajib, sedangkan hukum sholat dhuha adalah sunah. Hanya saja, pengertian hukum Islam yang diangkat ini tidak terbatas pada *Ahkamul Khomsah* seperti contoh di atas semata. akan tetapi yang dimaksud hukum Islam adalah sebuah sinonim dari istilah hukum syariat, hukum syara' atau syariat Islam. Pengertian hukum Islam sejajar dengan hukum umum. Dalam konteks hukum perdata, maka hukum Islam sejajar dengan hukum perdata tersebut. Dalam konteks hukum pidana, administrasi negara, tata negara dan yang lainnya, maka hukum islam dalam hal ini adalah sejajar dengan istilah atau pengertian tersebut.

Dalam konteks hukum Islam yang bermakna luas tersebut yang terwakili dalam istilah hukum syariat Islam, oleh Rifyal Ka'bah disebutkan bahwa syariat Islam mempunyai tiga pengertian. Pertama, sebagai keseluruhan agama yang

dibawa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, keseluruhan nushush (teks -teks) Quran dan Sunnah yang merupakan nilai-nilai hukum yang berasal dari wahyu Allah. Ketiga, pemahaman para ahli terhadap hukum yang berasal dari wahyu Allah dan hasil ijtihad yang berpedoman pada wahyu.

Secara umum, maka pengertian hukum Islam adalah segala hukum yang berasal dari sang Pembuat hukum atau syari (pembuat aturan) yaitu Allah SWT dan Muhammad SAW. Sedangkan dalam pengertian syariat Islam yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa pengertian tersebut adalah pengertian syariat Islam secara sempit yang berarti pemahaman fiqh oleh para ulama fiqh.²

2. Hukum Islam Menurut Para Ahli

Allah swt memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan akal fikirannya (*Ijtihad*).³ untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi, kebebasan ini tetap harus memperhatikan petunjuk, pedoman dan prinsip-prinsip umum yang telah tercantum pada al-Quran dan al-Sunah. Ijtihad pada dasarnya merupakan sumber hukum yang terbesar. Muhammad Iqbal dari Pakistan menyebutkan ijtihad sebagai “*the principle of movement*”.⁴ Dan Allah akan mengirim seseorang yang akan mentajdid (memurnikan) agama-Nya. Mujaddid (pemurni) ini akan mengembalikan agama yang sudah menyimpang kepada pengertian aslinya. Penyimpangan tersebut dapat terjadi pada teks agama, pemahamannya, prakteknya, atau pada semuanya. Dalam perspektif sejarah,

²<https://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-hukum-islam-menurut-rifyal.html>.

³Ijtihad menurut Abu Hamid al-Ghazali adalah “usaha keras yang dilakukan oleh mujtahid dalam mencari ketentuan-ketentuan hukum Syariat”. Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fii Ilmi al-Ushul*, (Bairut : Daar Ihya at-Turats al-Arabi, reprint Cetakan Mesir, 1324H).

⁴H. M. Rasyidi, *Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi*. (Cet. II; Jakarta ; Bulan Bintang, 1977), h.103.

sebagaimana yang telah dikutip oleh Sulaiman Abdullah mengenai pembaharuan hukum Islam menurut Noel J. Coulson yaitu ada empat bentuk :⁵

1. Dikodifikasikannya (yaitu pengelompokkan hukum yang sejenis kedalam kitab undang-undang) hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara, yang disebutnya sebagai doktrin siyasah.
2. Tidak terkaitnya umat Islam pada hanya satu madzhab hukum tertentu, yang disebutnya doktrin Takhayyur (seleksi) pendapat mana yang paling dominan dalam masyarakat.
3. Perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang baru timbul, yang disebut doktrin tatbiq (penerapan hukum terhadap peristiwa baru).
4. Perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru yang disebut doktrin tajdid (reinterpretasi). Gerakan pembaharuan ini telah menyebar ke beberapa wilayah. Diantaranya adalah Mesir, Turki, India dan Pakistan. Akan tetapi yang pertama adalah di Mesir. Berawal dari Kepergian tentara Napoleon Bonaparte meninggalkan Mesir (1801), yang kemudian dimanfaatkan oleh Muhammad Ali untuk mengambil alih pemerintahan Mesir. Selanjutnya berbagai gerakan-gerakan pembaharuan yang dimulai dari menerjemahkan beberapa buku dari Barat dan mengirimkan beberapa pelajar ke Barat. Memotivasi beberapa pemikir islam dari daerah lain untuk memulai pembaharuan. Sejarah pertumbuhan jaringan ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad ketujuh belas dan kedelapan belas melibatkan proses-proses historis yang amat kompleks. Pada awalnya

⁵Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam*. (Cet, II ; Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya 1996). h, 214.

hubungan itu lebih berbentuk perdagangan (hubungan ekonomi), politik keagamaan, kemudian diikuti dengan 22 hubungan intelektual keagamaan, lalu lahirlah hubungan Jaringan murid dan guru diantara kaum muslimin baik dari kalangan penuntut ilmu maupun muslim awam umumnya, dan inilah buah dari interaksi panjang diantara wilayah Muslim di Nusantara dan Timur Tengah.⁶

Adapun sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam secara singkat dapat dibagi menjadi lima periode, yaitu :

1. Periode Masa Nabi Muhammad SAW (610 M –632 M)
2. Periode Masa Khulafa al Rasyidin (632 M –662 M)
3. Periode Masa Perkembangan dan Pembukuan (Abad ke 7 –10 M)
4. Periode Masa Kemunduran Islam (Abad ke 10 / 11 M –19 M)
5. Periode Masa Pembaharuan dan Kebangkitan Islam (Abad ke 19).

Perkembangan hukum Islam pada (tahun 662 - 750 M) menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, dan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah (tahun 750 –1258 M) adalah merupakan perkembangan hukum Islam salah satunya terlihat dari lahirnya para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum Fiqh Islam (Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad Idris Syafii, Ahmad bin Hambal).⁷

Namun pada abad ke 10 sampai akhir abad ke 19 adalah masa kemunduran hukum Islam, yang ditandai dengan adanya kelesuan dalam melakukan ijtihad. Dimana para ahli tidak lagi mempunyai semangat dan kemampuan untuk

⁶Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. (Cet.III ; Bandung : Mizan, 1995). h. 23.

⁷Wahyuni Retnowulandari, Hukum Islam Dalm Tata Hukum Di Indonesia, (Cet. I; Jakarta : Universitas Trisakti, 2010), h. 60.

melakukan *Ijtihad* sehingga menimbulkan suatu pilihan terhadap sikap *Taqlid*⁸ dan *Ittiba*.⁹

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemunduran hukum Islam ialah Retaknya kesatuan wilayah Islam dengan membentuk kekuasaan sendiri mengakibatkan terbentuknya negara kecil sebagai negara pecahan, serta merosotnya kewibawaan pengendalian perkembangan hukum, karena dengan begitu munculah orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kelayakan didalam melakukan suatu *Ijtihad*.¹⁰

Saat kemunduran melanda kekuasaan Islam diseluruh dunia, timbulah pemikiran-pemikiran menuju pembaharuan semangat dikalangan masyarakat. Pemikiran-pemikiran itu timbul karena melihat adanya perbedaan besar antara nilai-nilai agama dan perkembangan sejarah. Di Indonesia, semangat pembaharuan Islam mendapat sambutan hangat dari para pemimpin Islam seperti H.O.S. Cokroaminoto, KH. Ahmad Dahlan, dan lain-lain. Walaupun di Indonesia tidak tercatat pemikiran-pemikiran besar ataupun penganjur-penganjur Islam yang terkemuka di dunia bukan berarti semangat pembaharuan tidak ada. Yang timbul di Indonesia bukan semangat-semangat pembaharuan, melainkan perjuangan pembaharuan. Karena penetrasi dan kemudian dominasi barat (Belanda), semangat Islam telah menjiwai banyak pemuka bangsa, baik dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan kerajaan yang banyak terdapat di Indonesia, untuk menentang dan melawan dominasi barat itu dengan segala cara.¹¹

⁸*Taklid* ialah sikap mengikuti pendapat suatu madzhab tanpa berusaha mengetahui dasar hukumnya.

⁹*Ittiba* ialah sikap mengikuti suatu madzhab atau imam dengan suatu dasar mengetahui dasar hukumnya.

¹⁰Wahyuni Retnowulandari, Hukum Islam Dalm Tata Hukum Di Indonesia, (Cet. I ; Jakarta : Universitas Trisakti, 2010), h. 67.

¹¹Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Cet I; Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), h, 90.

Perkembangan hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal, pertama adalah hukum yang berasal dari adat istiadat dan norma-norma masyarakat yang diterima secara turun temurun, yang berlangsung sejak lama sekali dan melekat dalam kesadaran masyarakat. Kedua adalah hukum yang berasal dari ajaran Agama, norma hukum yang berasal dari agama, adat istiadat dan tradisi turun temurun ini adalah cita-cita hukum (*rechtside*) bangsa Indonesia yang menjadi dasar hukum abstrak dan yang ketiga adalah hukum sebagai keseluruhan aturan kehidupan bersama, yang berasal dari legislator resmi yang disertai dengan sanksi tertentu dalam hal terjadinya pelanggaran dan dilaksanakan oleh negara.

Ketiga aturan hukum diatas terdapat dalam budaya hukum negara republik Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Membiacarkan budaya hukum Indonesia seseorang tidak dapat melepaskan diri dari ketiga bentuk aturan hukum yang dibicarakan diatas, dan dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut, konstruksi hukum Indonesia secara konstitusional berada diatas norma dasar UUD 1945, termasuk pada tingkat transisional seperti ditentukan dalam aturan peralihan UUD 1945.¹² Memperhatikan ini Abdul Gani Abdullah menyatakan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Kompilasi Hukum islam dalam Tata Hukum Indonesia bahwa hukum Indonesia yang lahir setelah 18 Agustus 1945 mempunyai empat bentuk dasar, pertama adalah produk legislasi kolonoal, kedua adalah hukum adat, ketiga adalah hukum Islam, dan keempat adalah produk legislasi nasional.¹³

¹²Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia. Indonesia (, Cet. I ; Jakarta : Universitas Yarsi, 1998,), h.75.

¹³Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : German Insani Press, 1994), h.15.

Sebelum kedatangan Belanda, hukum Islam sebenarnya telah mempunyai kedudukan tersendiri di Indonesia.¹⁴ Diantaranya adanya Sultan Malikul Zahir dari Samudera Pasai, ia adalah salah seorang ahli Agama dan hukum Islam terkenal pada pertengahan abad ke XIV Masehi. Melalui kerajaan ini, hukum Islam Madzhab Syafi'i disebarkan ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Para ahli hukum Islampun menulis buku-buku panduan tentang hukum Islam untuk disebar luaskan keseluruh masyarakat Nusantara, dan buku pertama yang disebar luaskan adalah buku yang berjudul al-Sirath al-Mustaqim (1628) yang ditulis oleh Naruddin ar-Raniri. Lalu Syekh Arsyad Banjar memperluas uraian buku ini dengan judul baru Sabil al-Muhtadin, untuk dijadikan sebagai pegangan menyelesaikan sengketa di kesultanan Banjar. Kesultanan Palembang dan Banten juga pernah menerbitkan beberapa buku hukum. Hal yang sama juga berlaku untuk penduduk di kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel, dan Mataram.¹⁵

Pada mulanya kedatangan Belanda ke Indonesia tidak ada kaitannyadengan masalah Agama, namun seiring berjalannya penjajahan mereka tidak bisa menghindari terjadinya persentuhan dengan masalah hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi (*Inlander*). Sehubungan berlakunya hukum adat bagi bangsa Indonesia dan hukum Agama bagi masing-masing pemeluknya, munculah teori-teori diantaranya adalah teori *Receptio in Complexu*, teori *Receptie*, teori *Receptie Exit* dan teori *Receptio A Contrario* serta teori *Eksistensi*.¹⁶

¹⁴Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Pembangunan Hukum Nasional : Suatu Analisa Terhadap RUU Peradilan Agama, (1989), h. 528.

¹⁵Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia. (Cet. I; Universitas Yarsi, 1998), h. 69.

¹⁶Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Cet. I ; Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), h., 111.

1. *Teori Receptio in Complexu* (Van Den Berg). Teori ini mengatakan orang Islam / pribumi berlaku hukum Islam (agama miliknya), oleh karena itu Van Den Berg mengonsepan Stablat 1882 No. 152, yang isinya ketentuan bahwa bagi rakyat pribumi / rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada dalam lingkungan hidupnya.
2. *Teori Receptie* (C.Snouck Hurgronye, Van Vollen Hoven dan Ter Haar). Teori ini mengatakan bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, oleh karena itu hukum Islam berlaku apabila sudah diterima oleh masyarakat adat yang dijadikan kebiasaannya. Teori ini dilandaskan pada keinginan Snouck agar orang-orang pribumi tidak kuat memeluk agamanya, sebab orang-orang yang kuat memegang agamanya tidak mudah untuk dipengaruhi oleh peradaban barat.¹⁷
3. *Teori Receptie Exit* (Prof. Hazairin). Di dalam bukunya yang berjudul “Tujuh Serangkai Tentang Hukum” ia mengatakan “ setelah proklamasi dan UUD 1945 dijadikan UUD Negara, maka walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan ajaran Teori Receptie tidak berlaku karena bertentangan dengan jiwa UUD 1945 dan pancasila. Maka Teori Receptie harus exit karena bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunah, oleh karena itu Prof. Hazairin menyebutkan Teori Receptie adalah Teori Iblis.¹⁸

¹⁷Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Islam Dalm Tata Hukum Di Indonesia*, (Cet. I ; Jakarta : Universitas Trisakti, 2010), h. 77.

¹⁸Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Islam Dalm Tata Hukum Di Indonesia*, (, Cet. I ; Jakarta : Universitas Trisakti 2010), h. 79.

4. *Teori Receptie A Contrario* (Sayuti Thalib). Teori ini mengatakan bagi orang Islam berlaku hukum Islam, hal tersebut adalah sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moral, dan hukum adat berlakubagiorangIslam apabila tidak bertentangan dengan agama Isalam dan hukum Islam.
5. *Teori Eksistensi* (Ichtijanto). Teori ini mengatakan bahwa setelah Indonesia merdeka dan karena dorongan kesadaran hukum sewaktu dalam masa penjajahan dan masa revolusi, maka hukum Islam adalah agama yang paling eksis didalam hukum nasional.

Teori-teori tersebut muncul sesuai zamannya masing-masing, bila dirumuskan *Teori Receptie in complexu* dan *Teori receptie* lahir pada zaman penjajahan, sedangkan *Teori Receptie Exit* dan *Teori Receptio A Contrario* lahir setelah kemerdekaan, begitupun dengan *Teori Eksistensi*.¹⁹

Menurut Asy-Syaikh Muhammad al-Khudhari hukum Islam dalam sejarahnya melalui enam fase legislasi, yang mempunyai ciri tersendiri sesuai dengan perkembangan yang dilalui oleh masyarakat Islam.²⁰

1. Fase kerasulan Nabi Muhammad SAW dimana segala sesuatu tentang hukum dikembalikan kepada Beliau.
2. Fase para sahabat Nabi yang senior (Kibar ash-shahabah), mulai dari saat kematian Nabi sampai akhir masa Khulafa Rasyidin.
3. Fase para sahabat Nabi yang yunior (shigor ash-shahabah), mulai dari permulaan masa Umawi sampai lebih kurang satu abad setelah Hijrah.
4. Fase fiqh menjadi ilmu tersendiri, mulai dari awal abad kedua Hijrah sampai akhir abad ketiga.

¹⁹Solihin Salam, Sejarah Islam di Jawa.(Cet. I ; Jakarta : Jayamurni, 1964), h. 62.

²⁰Asy-Syaikh Muhammad al-Khudhari Bek, Tarikh Tasyri al-Islami, (Bairut : Dar al-Fikr, 1988), h. 5-6.

5. Fase perdebatan mengenai masalah hukum dikalangan fuqaha, mulai dari awal abad keempat Hijrah sampai akhir masa Abbasiyah dan penaklukan Tartar atas dunia Islam pada abad ketujuh Hijrah (1258 M).
6. Fase taqlid (mengikut kepada pendapat-pendapat imam-imam yang terdahulu), mulai dari kejatuhan Dinasti Abbasiyah sampai sekarang.

Selain ke enam fase tersebut menurut Rifyal Ka'bah sebenarnya sebuah fase baru sedang tumbuh dalam waktu ini, bila kita memperhatikan perkembangan legislasi di dunia Islam dewasa ini, hukum Islam sebenarnya sedang memasuki fase ketujuh yaitu fase kodifikasi/kompilasi di beberapa negara anggota OIC (*Organization of Islamic Conference*) dan ijtihad untuk masalah-masalah kontemporer, terutama melalui lembaga-lembaga resmi negara atau semi resmi, atau lembaga-lembaga internasional, atau murni swasta. Tujuannya adalah untuk memperkaya hukum positif nasional.²¹

Pandangan lain tentang hukum Islam juga diutarakan oleh Fazlur Rahman, ia memandang hukum Islam itu bersifat dinamis dan harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Konsep Penegakan Syariat Islam di Indonesia

Konsep Syariat Islam Sebagaimana agama lainnya di dunia, Islam memiliki sumber dan ajaran yang harus diikuti dan dipedomani oleh komunitasnya. Islam juga merupakan sebuah risalah Allah yang memiliki ciri berbeda dengan agama lainnya di dunia. Keberbedaan ini terletak pada sumber ajarannya (risalah tersebut) berupa Qur'an pada awalnya, namun kemudian ditambah hadits sebagai penjelas dari Qur'an (firman Tuhan) sebagai sumber rujukan umat Islam. Sumber ajaran inilah menjadi dasar syari'at dalam Islam (pada gilirannya disingkat dengan syari'at Islam). Perbincangan diseputar syari'at

²¹Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia, (Cet. I ; Jakarta : Universitas Yarsi, 1998), h., 53.

Islam tak terlepas dari bahasan arti dan maknanya. Jika ditelusuri lebih lanjut, ditemui berbagai pemahaman menyangkut persoalan ini, tergantung sudut pandang pemikirnya. Syari'at Islam ini berasal dari dua ungkapan kata, yaitu syari'at dan Islam. Islam sebagaimana diketahui sebagai “din” (agama)²², sedangkan syari'at sendiri terdapat beberapa arti dan pemahaman, baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, syari'at sering diartikan sebagai sebuah jalan atau metode, namun juga ada mengartikannya sebagai hukum atau peraturan dan bahkan sebagai sebuah penjelasan. Hal ini tergantung dari sudut mana intelektual Islam melihat kata syari'at tersebut. Secara umum, syari'at merupakan sebuah sapaan Ilahi.

Pengertian seperti ini bisa dirujuk dari syari'at yang diambil dari kata syara'a (bahasa Arab) yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu.²³ Dalam kamus al-Munawir, syari'at berasal dari kata syar'u dan syara'a, yang berarti peraturan, undang-undang, hukum. Syari'at itu sendiri diartikan sebagai apa yang telah disyari'atkan Allah dari hukum-hukum-Nya (syari'at Allah).²⁴ Glasse menyebutkan, syari'at itu dari kata syara'a atau syir'ah dengan makna memperkenalkan, mengedepankan dan menetapkan. dan disebut juga sebagai hukum agama Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits.²⁵ Kemudian secara tegas Fazlur Rahman mengatakan syari'ah itu sebagai penentuan jalan dan subjeknya sendiri adalah Tuhan. Dan Islam sebagai ad-din, diartikan kepatuhan dan ketaatan secara harfiah, dengan subjeknya adalah manusia.²⁶ Terlepas dari

²²Seyyed Hossein Nasr, *Islam: Agama, Sejarah dan Peradaban* (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), h. 29.

²³Yusuf Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam: Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia* (Arasy Mizan: Bandung, 2003), h. 13.

²⁴Ahmad Warson Munawwir, *al- Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Pustaka Progressif: Surabaya, 2002), h. 712.

²⁵Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam* (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002), h. 382.

²⁶Fazlur Rahman, *Islam* (Pustaka: Bandung, 1997), h. 140.

persoalan bahasa tersebut, kata syari'at ini dalam Islam dipahami sebagai sebuah ketetapan Allah dan tidak bisa dirubah, karena ia merupakan sapaan Ilahi untuk manusia, atau merupakan sebuah risalah. Hal ini dapat dirangkum berdasarkan berbagai definisi yang berkembang saat ini mengenai syari'at Islam. Menurut Hossein Nasr, syari'at mengandung makna jalan yang semestinya diikuti oleh manusia dalam hidup mereka, karena ia meliputi segalanya dengan segenap aspek kehidupan dari ruang lingkup keagamaan (ibadah) dan muamalat.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas seputar term syari'at, secara tidak langsung terlihat bahwa kata syari'at ini merupakan suatu bentuk pesan Tuhan terhadap manusia yang sifatnya tetap dan tidak boleh berubah dan diubah oleh siapapun dan sampai kapanpun. Karena syari'at dari akar bahasanya bermakna jalan yang lurus, bukan dipahami hukum kecuali dalam pemahaman term fiqh.

Syari'at itulah firman Tuhan (al-Qur'an), yang didalamnya mengajarkan moralitas manusia demi mewujudkan kemaslahatan manusia itu sendiri, yang mengajarkan manusia akan kebenaran, keadilan, hak dan kewajibannya selaku makhluk Tuhan dan terhadap jalan hidup bagi sesamanya. Jadi bisa dikatakan, syari'at tidak hanya sekedar perintah atau seperangkat ketetapan saja. Namun juga merupakan sebuah wujud kewajiban umat Islam untuk direalisasikan dalam realitas sosial manusia demi kepentingan manusia sendiri, karena tujuan syari'at Islam itu untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan manusia, dengan melahirkan dan memelihara kemaslahatan manusia, menolak keburukan, menjaga hak-hak manusia. Itu semua merupakan bagian dari terbentuknya keseimbangan dunia dalam realitas kehidupan manusia di bumi.

²⁷Seyyed Hossein Nasr, *Islam : Agama, Sejarah dan Peradaban* (Risalah Gusti: Surabaya, 2003), h. 90-91.

Begitu juga konsep syari'at yang coba diterapkan dalam masyarakat Aceh, pada dasarnya menyepakati syari'at sebagai sebuah jalan atau metode, namun berangkat dari proses perkembangan syari'at itu sendiri, syari'at dalam kategori sempit dan luas. Maka penerapan syari'at Islam yang dikonsepskan di Aceh mengarah pada syari'at Islam dalam artian luas, karena meliputi semua aspek kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, penerapan syari'at Islam yang dijalankan dalam masyarakat Aceh dikonsepskan dengan format penerapan syari'at secara kaffah (menyeluruh).

Secara sekilas bisa dikatakan format penerapan syari'at Islam di Aceh beranjak dari pemahaman hukum syari'at yang telah berkembang. Disamping melihat aspek historis yang pernah terjadi di Aceh dengan syari'at Islamnya. Penerapan yang diterapkan ini dikenal dengan kaffah, artinya syari'at Islam dilaksanakan dalam masyarakat Aceh dari semua aspek kehidupan secara menyeluruh, baik dalam ruang lingkup perdata maupun pidana.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode ialah salah satu bentuk atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah penelitian. Metode ialah strategi ataupun cara-cara umum dalam proses pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang dihadapi.

Di dalam penulisan ini, metode yang digunakan ialah metode penulisan sejarah. Maka upaya merekonstruksi masa lampau dari objek yang diteliti itu ditempuh melalui penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Penelitian sejarah yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan peristiwa-peristiwa di masa lalu, baik yang dialami manusia secara pribadi maupun secara kolektif. Peristiwa-peristiwa di masa lalu yang berkenaan dengan penelitian dibagi atas dua bagian. Pertama, pelaku sejarah dan saksi sejarah tidak lagi dijangkau oleh peneliti sehingga data yang digunakan hanya berupa artefak dan dokumen-dokumen, dan kedua, pelaku sejarah dan saksi sejarah masih dapat dijangkau oleh peneliti sehingga data yang digunakan tidak hanya artefak dan dokumen tetapi juga berupa bahasa verbal pelaku dan saksi sejarah.

Penelitian ini mengambil tema Perkembangan Islam Di Bulukumba Tahun 2000-2005 (Studi Historis Penerapan Perda Syariat Islam). Yang terjadi beberapa tahun yang lalu dan pelaku sejarahnya masih dapat ditemui.¹

Adapun metode yang digunakan adalah *Field Research* (penelitian lapangan) dimana penelitian ini dilakukan secara langsung kelokasi dan mencari

¹Syamsuez Salihima, "Peta Politik di Sulawesi Selatan Pada Awal Islamisasi", *Jurnal Rihlah II*, no.1 (Mei 2015), h.36.

narasumber yang pernah terlibat langsung dengan objek dan masih bisa dijangkau oleh peneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pada bagian ini, peneliti membutuhkan beberapa pendekatan penelitian. Adapun pendekatan yang peneliti gunakan yaitu:

1. Pendekatan Historis

Dalam penelitian ini penulis melakukan suatu pendekatan yang sesuai dengan studi penelitian sejarah. Tentu dalam penelitian sejarah pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan history atau pendekatan sejarah. Pendekatan history atau Pendekatan sejarah merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian tentang objek sejarah, agar mampu mengungkap banyak dimensi dari peristiwa tersebut.²

2. Pendekatan Agama

Berdasarkan agama bertolak dari kesadaran bahwa pada hakikatnya seburuk apapun yang namanya manusia pasti memiliki Tuhan. Dalam pendekatan ini, penerapan peraturan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang harus dilaksanakan kepada setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.

3. Pendekatan Politik

Sejarah identik dengan politik karena jalannya sejarah selalu ditentukan oleh kejadian politik.³ Penelitian ini membahas tentang perkembangan Islam di Bulukumba (studi historis penerapan Perda Syariat Islam Tahun 2000-2005). Karena adanya unsur politik didalamnya sehingga penerapan Syariat Islam ini dihilangkan. Maka penulis merasa perlu menggunakan pendekatan politik dalam

²Rahmat, dkk. *Buku Dasar Praktek Penelusuran Sumber Sejarah dan Budaya* (Cet. 1; Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2012), h. 135.

³Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 17.

penelitian ini, agar peneliti lebih objektif dalam mengungkapkan atau menginterpretasikan penulisan ini.

4. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis ialah pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada pola-pola perubahan dan perkembangan yang muncul didalam masyarakat. Pola-pola tersebut berhubungan dengan perilaku, tradisi, kepercayaan, bahasa maupun interaksi sosial. Interaksi sosial ialah suatu gejala sosial yang selalu mewarnai kehidupan masyarakat sebagai wujud dari sifat manusia sebagai mahluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia yang lain. Interaksi dalam konsep sosial adalah hubungan manusia dengan manusia dan dalam kehidupan sosial. Pola-pola hubungna tersebut akan menghasilkan produk interaksi, yaitu nilai-nilai dan norma yang dijadikan sebagai pedoman dalam pergaulan sosial.⁴ Sebagaimana yang terlihat dalam pola pergaulan sosial yang tumbuh dalam lingkungan Bulukumba dan sekitarnya.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber data primer.

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁵ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data berdasarkan hasil wawancara dari pelaku-pelaku sejarah yang prnah terlibat ketika penerapan Perda Syariat Islam tahun 2000-2005 di terapkam di Bulukumba .

⁴Elly M. Setiadi, dkk., *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011), h. 25.

⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 117.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data skunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.⁶ Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data-data sekunder berupa buku, jurnal, surat kabar, majalah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Langkah-Langkah Penelitian

Ada beberapa langkah peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Heuristik

Heuristik merupakan suatu keterampilan dalam menemukan sumber. Dalam penelitian ini, sumber yang didapatkan penulis diperoleh melalui data kepustakaan konsepsi maupun data kepustakaan penelitian.⁷ Dalam tahap heuristik peneliti akan mencari dan mengumpulkan sumber data melalui wawancara, dokumen-dokumen, atau buku-buku serta sumber-sumber lainnya yang dinilai relevan dengan masalah yang dikaji.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber yang biasa disebut juga penilaian data adalah tahap penyaringan sumber yang diperoleh.⁸ Setelah data terkumpul maka perlu diadakan verifikasi data dan kritik untuk memperoleh keabsahan data yang telah diperoleh.⁹

⁶Rudi Siswoyo. "Makalah Sumber Data dalam Penelitian Kualitatif". *Gudang Ilmu*. <http://rudisiswoyo89.blogspot.co.id/2013/11/makalah-sumber-data-penelitian.html> (19 Oktober 2017).

⁷Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 55.

⁸Syamsuez Salihima, "Peta Politik di Sulawesi Selatan Pada Awal Islamisasi", *Jurnal Rihlah II*, no.1 (Mei 2015) h. 37.

⁹Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 58-59

3. Interpretasi

Setelah diadakan kritik sumber dan pengklasifikasian sumber data yang otentik maka langkah selanjutnya yaitu memberikan penafsiran terhadap data-data tersebut.¹⁰ Interpretasi merupakan penafsiran dari data-data yang telah diperoleh setelah melalui proses kritik sumber dan pengklasifikasian data secara otentik. Dalam hal ini penulis berupaya membandingkan data yang telah ada dan menentukan data yang berhubungan dengan fakta yang diperoleh, kemudian mengambil kesimpulan.

4. Historiografi (penyusunan)

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penulisan sejarah, dimana data yang telah teruji dan disaring keasliannya dan dapat dipertahankan nilai ilmiahnya diberi penafsiran disajikan dalam bentuk tulisan.

¹⁰Syamsuez Salihima, "Peta Politik di Sulawesi Selatan Pada Awal Islamisasi", *Jurnal Rihlah II*, no.1 (Mei 2015) h. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Masyarakat Bulukumba Sebelum Penerapan Syari'at Islam

Kondisi masyarakat Bulukumba sebelum diterapkannya perda syariat Islam ialah dimana masyarakat pada saat itu mengalami kemerosotan moral, contohnya: pemerkosaan, penganiayaan berat, pembunuhan, serta perilaku yang menyimpang contohnya perjudian, narkoba, pencurian, yang menjadi salah satu alasan dalam upaya penegakan syariat Islam di Kabupaten Bulukumba. Melalui perjuangan yang panjang sehingga pada saat Patabai Pabokori menjabat sebagai Bupati Bulukumba berhasil membentuk serta menerapkan peraturan Daerah (PERDA) bernuansa syariat Islam pada tahun 2000-2005.

1. Masuknya Islam di Bulukumba

Agama Islam masuk di Sulawesi Selatan pada awal abad ke 17, proses pengislaman di Sulawesi Selatan di bawah oleh tiga orang ulama dari Melayu, Ketiga orang tersebut adalah Abdul Makmur Khatib Tunggal (Datuk Ri Bandang), Khatib Sulaeman (Datuk Patimang), Abdul Jawad Khatib Bungsu (Datuk Ri Tiro). Mereka bertiga berpenjar, Datuk Ri Tiro menyebarkan agama Islam di Wilayah Bulumba (Tiro) dan Sekitarnya.

Proses penerimaan Agama Islam di wilayah Kerajaan Tiro (Bulukumba) dapat dilakukan dengan jalan damai, tidak seperti beberapa kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan yang melalui jalan perang (*Musu Selleng*: perang Islam). Besarnya pengaruh Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan, membuat kerajaan-kerajaan kecil yang menjadi taklukannya akan patuh dan ikut aturannya. Namun agama Islam masuk di Tiro tanpa tekanan dari Kerajaan Gowa. Melaikan karna keinginan kerajaan sendiri.

Kemudian proses masuknya Islam di Tiro diawali oleh pertemuan Raja Tiro V La Unru daeng Biasa yang memerintah antara tahun 1595-1625 dengan Khatib Bungsu (Datuk Ri Tiro) yang langsung disambut baik oleh Raja Tiro.¹

Tiro adalah sebuah kerajaan kecil yang terletak di Bulukumba, selain Tiro masih ada kerajaan-kerajaan kecil lainnya seperti: Kajang, Bulukumba, Gantarang, Hero atau Wero dan Bira. Kerajaan-kerajaan di Bulukumba tersebut banyak dihubungkan dengan Kerajaan Luwu, Gowa dan Bone. Kaitan tersebut dapat diketahui pada masa pemerintahan raja Gowa IX dan X, di pertengahan abad ke 16 kerajaan yang ada di Bulukumba dikuasai oleh Kerajaan Gowa, bahkan raja Gowa XI memungut upeti perang dari Kerajaan Bira serta menjadikan kerajaan-kerajaan lain sebagai palili. Pengaruh Kerajaan Gowa di daerah Bulukumba kemudian dipertegas setelah Perjanjian Caleppa tahun 1565, antara Bone dengan Gowa. Dimana dijelaskan bahwa daerah yang ada di sebelah selatan Sinjai menjadi daerah kekuasaan Gowa, sedang daerah di sebelah utara masuk daerah kekuasaan Bone (Cahaya, 1994:21).

Kemudian setelah agama Islam diterima di Kerajaan Tiro, maka timbul pertanyaan, mengapa Datuk Ri Tiro memilih Kerajaan Tiro sebagai tempat menyebarkan agama Islam? Alasannya ialah dengan suatu pertimbangan untuk memperluas wilayah penyiarnya. Misalnya Kerajaan Gowa yang penyebarannya terkonsentrasi di bagian barat, Kerajaan Luwu untuk bagian timur, sementara Bulukumba dapat mempengaruhi bagian selatan. Jadi dengan melalui Bulukumba Islam masuk, maka akan terhembus ajaran ini ke beberapa kerajaan yang

¹Bahtiar, Islamisasi Di Tiro Bulukumba. Jurnal “Al-Qalam”, Vol 18 no.2 (Juli – Desember 2012), h. 227.

bersebelahan dengan Bulukumba. Selanjutnya, yang menjadi daya tarik lain adalah Tiro berpotensi bagus karena memiliki pelabuhan yang baik serta aman untuk disinggahi kapal-kapal dari Jawa, Maluku, Melayu, dan lain-lain. Dengan letak geografis demikian, menjadikan penyiaran agama Islam lebih mudah, karena sarana komunikasi yang lancar. Selain pelabuhan pantai Tiro terdapat juga Pelabuhan Bira dan Pelabuhan Biropa yang banyak disinggahi kapal-kapal dagang nusantara (Intang, 1995:68). Agama Islam mula-mula tiba di negeri yang mempunyai pelabuhan niaga yang ramai dikunjungi oleh pedagang Islam (Mattulada, 1998:148).²

Datuk Ri Tiro dalam menyiarkan agama Islam melalui ajaran Tasawuf yang dilakukan dengan mempermudah proses pengajarannya, sehingga proses penerimaanyapun mudah diterima, baik di lingkungan maupun untuk rakyat biasa. Sistem penyiaran agama Islam yang dilakukan oleh ketiga Ulama Melayu ini adalah melaluinya dengan memulainya di lingkungan kerajaan. Dengan demikian apabila raja sudah menerima Islam, maka rakyatnya dengan mudah ikut menerimanya.³

Masuknya agama Islam di Tiro yang di bawah oleh Datuk Ri Tiro sangat sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Setelah masuknya Islam di Tiro telah membawa perubahan dan suasana baru terhadap rakyat. Kebiasaan-kebiasaan mereka sebelumnya dalam ritual lebih cenderung secara konseptual menyalahi logika berpikir yang baik namun akan membawa rakyatnya ketaraf hidup yang lebih baik, damai dan sejahtera. Masuknya ajaran islam di tengah masyarakat yang lebih aktual, telah

²Bahtiar, Islamisasi Di Tiro Bulukumba. Jurnal “Al-Qalam”, Vol 18 no.2 (Juli – Desember 2012), h. 230.

³Bahtiar, Islamisasi Di Tiro Bulukumba. Jurnal “Al-Qalam”, Vol 18 no.2 (Juli – Desember 2012), h. 228.

membawa masyarakatnya lebih tenang, damai dan lebih nyata, karena ajaran-ajarannya mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha esa.

2. Perkembangan Islam di Bulukumba

Setelah penerimaan agama Islam oleh raja, kemudian diikuti oleh seluruh pembesar kerajaan dan seluruh rakyat (karena sistem penyebaran Islam yang dipergunakan oleh Datuk Ri Tiro melalui tasawuf). Adapun mengenai tahun yang pasti La Unru Karaeng Biasa memeluk agama Islam pada tahun 1013 H atau 1604 M (Ensiklopedia Islam:245); (Mattulada, 1976:93); (Salahuddin, 1993:34). Bagi rakyat wajib menjunjung tinggi titah raja, apalagi yang berkaitan dengan kepentingan kerajaan. Raja memiliki kharisma, kewibawaan, wewenang dan kekuasaan. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh ketiga datuk, sehingga dari kalangan penguasa ini kemudian Islam menyebar ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Strategi memilih mengislamkan kalangan penguasa lebih dulu adalah merupakan strategi yang jitu, karena hal itu diterima mereka. Rakyat tinggal mengikuti, kewibawaan mereka dimata rakyat luar biasa besarnya (Poelinggomang, 1994:88).⁴

Setelah Islam diterima, sebagai agama Kerajaan Tiro, maka rakyat mendalami ajaran-ajarannya, sehingga kepercayaan-kepercayaan lama sudah ditinggalkan. Kebiasaan minum-minuman keras dan makanan haram juga sudah tidak dilakukan lagi. Kegiatan-kegiatan keagamaan sudah berjalan dengan baik di Masjid maupun di rumah-rumah seperti pengajian, zikir dan sebagainya. Upacara perkawinan, aqiqah dilakukan dengan cara Islam, namun tidak meninggalkan budaya-budaya lama dari leluhur sepanjang sesuai dengan aqidah Islam. Kemudian perkembangan Islam

⁴Bahtiar. Islamisasi Di Tiro Bulukumba. Jurnal "Al-Qalam", Vol 18 no.2 (Juli – Desember 2012), h. 230.

selanjutnya mulai dikembangkan oleh beberapa orang yang amat besar perhatiannya terhadap kemajuan Islam di Bulukumba. Tokoh-tokoh inilah yang meneruskan syiar Islam yang sudah dirintis oleh Datuk Ri Tiro yang didukung oleh raja di Tiro.

a. Tokoh-Tokoh Penyebar Agama Islam Ri Tiro

1. Raja Bira V Bakka Daeng Bura'ne

Raja Bira V Bakka Daeng Bura'ne hidup antara tahun 1586-1650, sebelum menjadi raja, beliau bernama I Bu'ne dan setelah menjabat bergelar Turibarugana berarti raja yang sementara memerintah di Bira. Beliau berasal dari keturunan karaeng dan dikawinkan pada usia 17 tahun dengan keluarganya sendiri yang bernama I Manneng (Intang, 1995:69).

Raja Bira V Bakka Daeng Bura'ne dalam menyebarkan agama Islam diseluruh perkampungan Bira, mendapat sambutan dari kalangan masyarakat Bira yang telah lama mendambakah datangnya ajaran Islam. Peranan dan usaha Bakka Daeng Bura'ne dalam penyebaran agama Islam di Bira, adalah membangun masjid bersama Abdul Basir (Turi Masigina) pada tahun 1612 di Kalubiri, Bira. Masjid ini berbentuk seperti pura (rumah ibadah agama Hindu) yang pernah berpengaruh di Bira. Masjid tersebut atapnya bertingkat dan bersusun tiga. Corak khas atap masjid tersebut digambarkan dengan 3 maksud; pertama, melambangkan kedudukan Allah, kedua, melambangkan kedudukan Nabi Muhammad SAW, ketiga melambangkan kedudukan umat Islam dipermukaan bumi.

2. Pentang Daeng Manaba

Pentang Daeng Manaba adalah seorang tokoh yang berasal dari Luwu, beliau memperdalam ilmu agama Islam di Tiro selama tiga tahun, dan ilmu yang diperoleh diajarkan kepada masyarakat. Pemahaman ilmu-ilmu agama Islam yang dimilikinya,

membuat beliau dikenal sebagai alim ulama atau panrita dalam bahasa Bugis. Beliau berasal dari keturunan Luwu dan Gowa yang diagung-agungkan oleh masyarakat Sampeang. Sebagian hidupnya dimanfaatkan untuk menyampaikan ajaran Islam di Sampeang, Kabupaten Bulukumba (Mansur, 1995:34).

Usaha beliau dalam menyiarkan Islam di Sampeang adalah menyerukan kepada rakyat agar menerima Agama Islam karena telah menjadi agama resmi kerajaan di daerah Sampeang. Pentang Daeng Manaba sebagai Topanrita (orang pintar) sangat bijak dalam menyiarkan agama Islam. Beliau dapat mengislamkan masyarakat Sampeang dengan cara tidak memaksa. Hal itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari dengan suasana pergaulan yang sangat akrab antara beliau dan masyarakatnya. Setelah Islam dianut oleh masyarakat Sampeang, maka beliau berusaha mengubah kebiasaan yang secara turun temurun masih dipegang teguh, misalnya dalam upacara pesta perkawinan ada istilah mappaccing. Saat mappaccing diperdengarkan mantra-mantra diganti dengan zikir dan memperdengarkan lafal-lafal dalam bahasa Arab.

3. Janggo Toa, Janggo Tojarra dan Towasara Dg. Mallipa

Setelah agama Islam resmi diterima sebagai agama kerajaan di Tiro, maka selanjutnya beliau mencari raja yang terkenal keberaniannya untuk mengikuti pelajaran agama Islam. Ditunjuklah raja Kajang (Amma Toa). Raja Kajang lalu mengutus Janggo Toa ke Tiro untuk belajar agama Islam. Pokok pokok ajaran yang diterimanya adalah sebagai berikut: Mengucapkan dua kalimat syahadat, *Kaelong Tedong* (masalah penyembelihan), *Kalambussan umuru* (masalah kematian) *Passunna* (masalah khitan), (Cahaya, 1994:24). Ajaran agama Islam yang diterima oleh Janggo Toa dari Datuk Ri Tiro dirasakan belum memuaskan, karena Janggo Toa

sendiri buta huruf (tidak bisa membaca dan menulis), sehingga lambat menerima ilmu dari Datuk Ri Tiro.

Kemudian Amma Toa mengutus kembali Janggo Tojarra ke Bontoala (wilayah Kerajaan Gowa), untuk mempelajari agama Islam. Hal ini dilaksanakan berdasarkan keputusan masyarakat dari ketiga unsur adat yaitu *labbiri*, *sanro*, *adat*. Dengan adanya ahli agama yang disebut guru maka lengkaplah unsur adat yaitu: *labbiri* (Karaeng Tallu), *adat* (ada 5), *sanro* (Amma Toa) dan guru (ulama).

Adapun ajaran yang diterima oleh Janggo Tojarra adalah segi amaliah yang menyangkut tiga hal yaitu:

- a. Pelaksanaan perkawinan menurut Islam (nikah)
- b. Penyelenggaraan pemahaman secara Islam
- c. Hewan harus disembelih menurut Islam (Cahaya, 1994:25).

Setelah itu Amma Toa kembali mengutus untuk ketiga kalinya yaitu Towasara Daeng Malipa, kemudian digelar sebagai *Tusalama Rijala*. Menurut beberapa informasi dari masyarakat, bahwa beliau adalah anak dari Syekh Yusuf Tuanta Salamaka ri Gowa. Sehingga beliau bergelar *Tusalama ri Jalaya* yang berarti orang selamat di jalannya (Cahaya, 1994:25).

Beliau mula-mula belajar agama Islam di Bulobulo, kemudian memperdalam pengetahuannya di Luwu, selanjutnya kembali ke Kajang untuk menerapkan ilmu yang diperoleh. Namun Towasara Daeng Malipu belum dinilai mendapatkan syariat Islam yang murni, karena saat diutus ikut belajar pada Datuk Ri Bandang di Bontoala, beliau kembali sebelum waktu yang telah ditentukan oleh raja. Pada waktu yang relatif singkat itu, beliau hanya sempat mendapatkan 3 hal yaitu:

- a. Penyelenggaraan perkawinan dalam Islam

- b. Penyelenggaraan pemakaman mayat secara Islam
- c. Budak bersama dengan suro, karaeng dan adat pada pesta adat yaitu guru, (Cahaya, 1994:26).

Ketiga utusan Amma Toa tersebut itulah yang mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Kajang. Di samping menganut kepercayaankepercayaan leluhur mereka, masuknya pengaruh Islam di Kajang dan sekitarnya tidak mempengaruhi konsepsi kepercayaan Amma Toa, sehingga tidak mengalami penolakan, melainkan disambut dengan penuh perhatian.⁵

3. Kebijakan Pemerintah Sebelum Penerapan Perda Syariat Islam

Cita-cita yang mulia tidak harus terakumulasi dari orang banyak, mungkin saja sebuah pemikiran cerdas lahir dari seorang peribadi tanpa dukungan orang banyak, namun pada akhirnya membuat orang menggut-manggut. Pengalaman batiniah yang ia lalui selama menjabat sebagai Sekertaris daerah mendampingi Bupati Bulukumba saat itu Drs. Andi Tamrin, diawali tahun 90-an, terekam dalam diri dan menjadi catatan terpenting yang melengkapi perjalanan karirnya sebagai pamong.⁶

Dalam semangat yang religius dapat menumbuhkan kesadarannya untuk senangtiasa mengaktualisasikan nilai-nilai Islam. Berawal ketika dia sering mendapat tugas Bupati dalam kegiatan dinas di pelosok-pelosok kampung. Kondisi masyarakat kampung yang dijumpainya memberikan gambaran yang sama, yakni nuansa

⁵Bahtiar. Islamisasi Di Tiro Bulukumba. Jurnal “Al-Qalam”, Vol 18 no.2 (Juli – Desember 2012), h. 232.

⁶Mahrus Andis. Mengawal Bulukumba Ke Gerbang Syariat Islam, (Sketsa Religius Bupati H. A. Patabai Pabokori). (Cet. III ; Makassar: Pustaka Refleksi 2014), h. 1.

keagamaan. Sejak dahulu, gambaran bernuansa Islami seperti itu sudah melekat secara kental ditengah kehidupan masyarakat Bulukumba. Berawal dari pengalaman tersebut membuat iya berkontemplasi dan tidak jarang melakukan internalisasi kultural untuk senagstiasa membangun kreatifitas dibidang pengembangan Syiar Islam tanpa menghilangkan aspek tradisi dan budaya masyarakat yang berlaku turun temurun. Pengalaman ini pula yang seakan melukiskan relief kegelisahan spiritual dalam dirinya sehingga disela-sela kunjungannya di suatu kampung iya dapat memanfaatkan waktu bersilaturahmi dengan para tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama.

Pengalaman kehidupan masyarakat kampung saat itu, dengan melalui internalisasi budaya semakin memantapkan keinginan religius Patabai Pabokori. Waktu itu, posisinya baru menduduki jabatan Sekertaris daerah dan bukan penentu kebijakan, namun selaku muslim ia sudah menampilkan berbagai sikap keagamaan disetiap perilakunya.⁷

Banyak persoalan yang sering muncul mengenai tema silaturrahminya dengan masyarakat. Namun diantara persoalan-persoalan itu, aspek Agama dan tradisi budaya masyarakat menempati posisi periorotas utama menjadi perhatiannya. Dari berbagai dialog yang sering iya lontarkan, tercermin niat baik Andi patabai untuk menseseriusi persoalan-persoalan Agama dan tradisi budaya yang berkembang ditengah masyarakat. Menurutnya, Agama dan Budaya tidak bias dipisahkan. Agama mengandung nilai-nilai budaya dan budaya menyerap kesan-kesan keagamaan.

⁷H. A. Patabai Pabokori (67), Bupati Bulukumba periode 1995-2005, *wawancara* Makassar, 23 Oktober 2018.

Pandangan seperti ini melahirkan analogi pemikiran bahwa Al Qur'an sebagai kalam Ilahi adalah konsep dasar agama Islam.⁸

Banyak pemikiran cerdas yang pernah lahir dari sosok pribadinya. Indikator yang paling jelas tentang hal ini dapat dilihat dari komitmennya untuk membangkitkan kembali roh tradisi budaya Islami di tengah masyarakat. Berbagai bentuk tradisi budaya bernuansa Islam yang ada di daerah ini diminta agar ditata kembali. Tujuannya sudah jelas. Mengakomodasi ritual budaya masyarakat yang bernilai ibadah dan memiliki potensi sebagai basis pengembang syiar islam.komitmen ini segera menggema sampai ke pelosok Desa.

Kiprah Andi Patabai Pabokori ditahun pertama jabatannya selaku Sekertaris daerah (1992), membawa nuansa baru dalam konteks pembinaan masyarakat Islam. Program pembentukan lembaga kegiatan Islami, seperti remaja masjid, taman kanak-kanak Al-Quran (TPA) dan majelis taklim, belumlah menjadi prioritas utama pada saat itu, karna mengingat posisinya sebagai Sekertaris daaerah yang dapat memiliki kewenangan yang terbatas dan bukan penentu suatu kebijakan tertinggi di birokrasi pemerintahan.

Namun demikian, tidak dapat di pungkiri kalua wacana berfikir selama itu dilontarkannya mampu menggerakkan prakarsa masyarakat untuk berani berbuat sesuatu ynag dianggap bermanfaat.

Ada hal yang menarik dari sisi peribadinya dia menggemari konsep pemikiran praktis dan realistis. Sejak menjabat Sekertaris Daerah (sekda), hingga menjabat sebagai Bupati, ia sering melakukan jihad kebudayaan lewat lontaran pikiran yang

⁸Mahrus Andis, Mengawal Bulukumba Ke Gerbang Syariat Islam, Sketsa Religius Bupati H. A. Patabai Pabokori). Cet. I ; Makassar: Pustaka Refleksi 2014), h. 3.

pada akhirnya, berhasil merasionalisasi sikap dan perilaku yang irasional. Kesan ini muncul ketika ia sedang mengkritisi persoalan yang nampak dihadapannya.⁹

Pemikiran yang religius yang paling signifikan sebagai refleksi jihad kebudayaan dapat tercermin dari sikap dukungannya terhadap pengembangan potensi pemuda dan remaja masjid yang ada di daerah Bulukumba. Ada sisi terpenting yang harus digali dari kalangan generasi Islam, terutama semangatnya yang tinggi untuk merelokasi diri dan merekomendasikan pikiran-pikiran keagamaan melalui wadah organisasi remaja Mesjid.

Jihad kebudayaan yang tercermin dari cara berpikirnya dapat menyentuh semua sisi kehidupan manusia, baik politik, sosial budaya, ekonomi, hukum dan pemerintahan maupu sisi keagamaan. Jihad kebudayaan di biadng etika perilaku dan infrastruktur keagamaan, khususnya Islam. Karena itu obsesi kerinduan religius yang dia pendam selama menjabat sebagai sekretaris Daerah di masa lalu, hakikatnya adalah konsepsi dasar untuk membangun kontalasi “jahad kebudayaan Islam” ke depan.¹⁰

B. Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Perda Syariat Islam

1. Mensosialisasikan Kesadaran Masyarakat untuk Menciptakan Keberagaman Berdasarkan Syariat Islam

Bagi pemerintah daerah Bulukumba, pembangunan nasionalis merupakan pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual

⁹Mahrus Andis, *Mengawal Bulukumba Ke Gerbang Syariat Islam*, (Sketsa Religius Bupati H. A. Patabai Pabokori). (Cet. I ; Makassar: Pustaka Refleksi 2014), h. 8.

¹⁰Mahrus Andis. *Mengawal Bulukumba Ke Gerbang Syariat Islam*, (Sketsa Religius Bupati H. A. Patabai Pabokori). (Cet. III ; Makassar: Pustaka Refleksi 2014), h. 11.

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah Bulukumba merumuskan visi Kabupaten Bulukumba sebagai pusat pelayanan dibagian Selatan Sulawesi Selatan berbasis pada sumber daya lokal yang bernapaskan keagamaan.¹¹

Pelaksanaan Syariat islam di Indonesia tidak hanya sebagai wacana belaka, namun sudah diperaktekkan oleh mayoritas penduduknya. Diantara Daerah yang ada di wilayah Indonesia yang telah melaksanakan Syariat Islam ialah Aceh, ini sedang menerapkan pelaksanaan Syariat Islam. Pelaksanaan Syariat Islam diberlakukan dan mendapatkan legalitas kerna dapat didukung dengan sosio kultural dan historis masyarakatnya. Karna Aceh dikenal dulunya sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara.

Peraturan daerah (Perda) keagamaan merupakan seperangkat aturan yang bernuansa Syariat Islam. Perda keagamaan biasa juga disebut sebagai Perda Syariah di sejumlah daerah di Indonesia tergantung pemerintah setempat yang mengistilahkan hal tersebut di daerahnya masing-masing.¹²

Penerapan Syariat Islam melalui Peraturan Daerah telah menjadi populer di tiap daerah kabupaten. Diantara sekian kabupaten di Sulawesi Selatan, Bulukumba adalah salah satu kabupaten yang cukup terkenal dalam penerapan syariat islam melalui peraturan daerah. Orde reformasi setidaknya memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk memperjuang

¹¹Anis K Al-Asyari Dkk. Menapak Hari Esok Bulukumba Yang Lebih Baik, (Cet.I ; Makassar: Perpustakaan 2004), h. 184.

¹²Amril Maryolo. AR, "Formalisasi syariat Islam di Bulukumba (Studi Tentang Peraturan Daerah keagamaan)" *Tesis* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN sunan Kalijaga 2017), h. 101.

kan cita-citanya. Di Sulawesi Selatan sendiri, dalam upaya penerapan syariat islam melalui peraturan daerah memerlukan perjuangan yang panjang.¹³

Keberadaan Perda Syariah masih dilematis baik dari segi implementasi maupun konsep. Terdapat kalangan menilai bahwa keberadaan Perda Syariah tidak perlu, tetapi ada pula yang menilai bahwa Perda Syariah sangat penting dalam menjaga moral dan ketertiban umum masyarakat. Bagi yang berpandangan optimis Perda Syariah memiliki masa depan yang cerah dalam kehidupan publik masyarakat Muslim untuk membentuk karakter nilai-nilai Islam, membina lembaga, dan relasi sosial. Perda Syariah akan terus memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan norma etika yang direfleksikan dalam kebijakan publik melalui proses politik yang demokratis.¹⁴

Kabupaten Bulukumba sendiri, perjuangan untuk mewujudkan Perda Syariat Islam tidaklah mudah, ada banyak elemen yang terlibat dan tidak sedikit juga hambatan yang dapat menghadang. Dalam pernyataan Patabai Pabokori (Mantan Bupati Bulukumba) ialah dalam mewujudkan Perda Syariat Islam di Bulukumba sebenarnya merupakan keinginan ummat islam di Bulukumba. Jadi ketemu antara keinginan dari masyarakat itu sendiri dan keinginan dari pemerintah, sehingga diramulah dan dibuatlah Perda Syariat Islam dan mendapat sambutan dari anggota DPRD Bulukumba, karna bagaimanapun, eksekutif berjuang kalau tidak mendapat respon dari DPDR kan itu dapat menghambat. Kemudian yang kedua kami banyak

¹³Andi Mannaungi, “Peranan Perda Syariat Islam Dalam Upaya Menanggulangi Perilaku Penyimpangan Remaja Di Kelurahan Borong Rappoa kabupaten Bulukumba” *Skripsi* (Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2013), h. 2.

¹⁴Amril Maryolo. AR, “Formalisasi syariat Islam di Bulukumba (Studi Tentang Peraturan Daerah keagamaan)” *Tesis* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN sunan Kalijaga 2017), h. 103.

mendapat dukungan dari Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI), juga Jundullah yang pada saat itu gencar gerakannya.

Pernyataan mantan Bupati Bulukumba tersebut menegaskan bahwa perjuangan penerapan Syariat Islam melalui Perda benar-benar keinginan dari rakyat Bulukumba dan berbagai elemen masyarakat yang memang berjuang seperti KPPSI dan Jundullah sehingga akhirnya mendapat sambutan dari DPRD Bulukumba.¹⁵ Usaha pemerintah dalam penerapan Perda Syariat Islam, bermakna memacu pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah dalam karangka pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan ketaqwaan ummat Islam melalui penentuan kegiatan berdasarkan sistem.

Program ini, sesungguhnya merupakan jawaban atas emosi religiusitas yang berkembang ditengah masyarakat serta menuntut adanya pembakaun manajemen secara sistematis, sinergik dan berkelanjutan. Sebagai Bupati dia memahami hal ini dari sisi manajemen pemerintahan. Karena itu, dia muali memikirkan rencana strategis untuk meramu fenomena religiusitas ini agar mendapat landasan moral bagi proses pembangunan disegala bidang. Atas dukungan dari beberapa Tokoh Agama dan ORMAS Islam, di tahun 1998, crash program pemerintah daerah dibidang keagamaan dicetuskan secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Pencetusan secara resmi ini merupakan titik awal dilakukannya pembakuan manajemen oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap enam segmen kegiatan syiar Islam yang menjadi prioritas di dalam pembangunan daerah. Keenam segemen kegiatan yang dimaksud ialah pembinaan dan pengembangan Pemuda Remaja Mesjid, pembinaan

¹⁵H. A. Patabai Pabokori (67), Bupati Bulukumba periode 1995-2005, *wawancara* Makassar 23 Oktober 2018.

dan pengembangan Taman Kanak-Kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an, pembinaan dan pengembangan Majelis Taklim, pembinaan dan pengembangan Hafidz Qur'an, pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Masjid, serta pengembangan dan pembinaan Seni bernuansa Islam.¹⁶

Hal tersebut yang kemudian senangtiasa dilakukan pemerintah dalam mewujudkan Perda Syariat Islam di kabupaten Bulukumba.

Proses formalisasi Syariat Islam selalu menuai pro-kontra dan negoisasi antar elit pemerintah, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), dan tokoh agama. Dalam proses perumusan dan implementasinya selalu terjadi proses negoisasi antaraktor untuk melaksanakan perda keagamaan khususnya di Bulukumba. Negoisasi kepentingan selalu mewarnai perumusannya untuk memudahkan pemerintah untuk melegalkan aturan keagamaan di Bulukumba.

Penerapan Syariat Islam berimplikasi kepada tatanam masyarakat dan sosial politik di pemerintahan daerah. Agenda pemerintah Bulukumba dalam penerapan Syariat Islam memunculkan perdebatan isu-isu formalisasi Syariat Islam dalam bentuk kebijakan perda bernuansa Syariah. Hal ini dapat memunculkan pendapat dan pemikiran yang beragam antar aktor Islam, negara, dan masyarakat sipil mengenai model dan defenisi Syariat Islam.

perdebatan publik berefek pada reaksi yang timbul di masyarakat Muslim dalam memandang, memodifikasi, menerima, atau bahkan menolak implementasi Perda keagamaan di Bulukumba. Elit politik lokal Bulukumba memiliki pandangan

¹⁶Mahrus Andis. Mengawal Bulukumba Ke Gerbang Syariat Islam, (Sketsa Religius Bupati H. A. Patabai Pabokori). (Cet. I ; Makassar: Pustaka Refleksi 2014), h. 43-44.

yang berbeda dengan aktor-aktor lainnya yaitu masyarakat sipil, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya mengenai masyarakat berbasis Syariah Islam.¹⁷

Melalui *Crash Program Keagamaan* ini, merupakan salah satu strategi pemerintah Bulukumba di bawah pimpinan Patabai Pabokori untuk meramu religiusitas masyarakat Bulukumba agar menjadi modal dan spirit dalam pembangunan diberbagai sektor. Dari sekian banyak program pemerintahannya ia mencoba merumuskan program keagamaan yang merupakan kebutuhan masyarakat luas. Dengan adanya dukungan oleh KPPSI Bulukumba, Muhammadiyah Bulukumba, Nu dan Jundullah, dan pada akhirnya meluncurkan program pemerintah daerah dibidang keagamaan dan diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, H. ZB. Palaguna.

Crash Program tersebut memprioritaskan delapan aspek kegiatan keagamaan diantaranya sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan Remaja Mesjid.
2. Pembinaan dan pengembangan Taman Kanak-kanak Al Quran (TKA) dan Taman Pendidikan Al Quran (TPA).
3. Pembinaan dan pengembangan Majelis taklim.
4. Pembinaan dan Pengembangan Hafsil Quran
5. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Mesjid.
6. Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shdaqah.
7. Penbinaan dan Pengembangan seni Bernuangsa Islam.
8. Pelestarian Keluarga Sakinah, Sejahtera, dan Bahagia.¹⁸

¹⁷Amril Maryolo. AR, "Formalisasi syariah Islam di Bulukumba (Studi Tentang Peraturan Daerah keagamaan)" *Tesis* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN sunan Kalijaga 2017), h 101-102.

Kedelapan Aspek kegiatan pemerintah daerah dibidang keagamaan ini dapat dikatakan sebagai proses awal menuju pembentukan sikap dan perilaku kemasyarakatan yang seirama dengan nilai-nilai Syariat Islam.

Disadari bahwa menegakkan Syariat Islam secara revolutif tidaklah mudah. Karena, melalui beberapa kajian dan atas dukungan lembaga-lembaga keagamaan, dengan landasan semangat dan keberanian, pemerintah daerah berupaya meramu idealitas keagamaan yang dapat berkembang ditengah masyarakat melalui kebijakan politis dalam bentuk peraturan daerah.¹⁹

2. Membentuk Aturan dalam Penerapan Perda Syariat Islam

Kebijakan otonomi daerah memberi peluang bagi tiap-tiap daerah untuk memperjuangkan otonominya dan setelah perjuangan yang panjang, Kabupaten Bulukumba berhasil menerapkan Perda Syariat Islam. Ada empat Perda Syariat Islam yang diberlakukan di Kabupaten Bulukumba. Sejak tahun 2002 di daerah ini sudah berlaku perda Syariat Islam, diantaranya:

1. Perda Nomor 03 Tahun 2003 tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman keras.
2. Perda Nomor 02 Tahun 2003 tentang pengelolaan zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah.
3. Perda Nomor 05 Tahun 2003 tentang pakaian Muslim dan Muslimah.
4. Perda Nomor 06 Tahun 2003 tentang pandai Baca Tulis Al-Quran bagi Siswa dan calon Pengantin.

¹⁸H. A. Patabai Pabokori (67), Bupati Bulukumba periode 1995-2005, *wawancara* Makassar 23 Oktober 2018.

¹⁹Mahrus Andis. Mengawal Bulukumba Ke Gerbang Syariat Islam, (Sketsa Religius Bupati H. A. Patabai Pabokori). (Cet. I ; Makassar: Pustaka Refleksi 2014), h. 86.

Sebelum pemerintah menerapkan ke empat perda tersebut, langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah ialah mengakumulasi idealitas keagamaan mereka kedalam bingkai kebijakan politisi melalui peraturan daerah, maka pada tahun 2002, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba, dapat diterapkan PERDA Nomor 03 Tahun 2002 tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol.

Sebagian besar masyarakat terutama yang memiliki komitmen terhadap pengamalan ajaran Islam melalui peraturan daerah tersebut sangat tepat untuk meminimalisasi pelanggaran akibat pengaruh minuman keras. Selain itu, peraturan daerah ini sudah sejalan dengan cita-cita keagamaan yang menjadi misi pemerintah²⁰

Perda tentang minuman beralkohol ini barulah awalan dari pemerintah untuk memasang salur-salur keagamaannya, terbukti dalam kurung waktu kurang lebih satu tahun kiprah kepemimpinan Bapak Andi Patabai Pabokori selaku Bupati pada saat itu, kemudian menyusul tiga peraturan daerah secara bersamaan yang dapat ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba ketiga perda yang dimaksud ialah : Perda Nomor 02 Tahun 2003 tentang pengelolaan zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah, Perda Nomor 05 Tahun 2003 tentang pakaian Muslim dan Muslimah dan Perda Nomor 06 Tahun 2003 tentang pandai Baca Tulis Al-Quran bagi Siswa dan calon Pengantin.

Bagi pemerintah Bulukumba semakin meluas dan semakin bebasnya peredaran dan perdangangan minuman beralkohol (Miras), dapat mengganggu ketengtraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka perlindungan terhadap

²⁰H. A. Patabai Pabokori (67), Bupati Bulukumba periode 1995-2005, *wawancara* Makassar 23 Oktober 2018.

masyarakat, pemerintah daerah Bulukumba tidak hanya mendukung secara verbal usaha aparat penegak hukum atau hanya menyatakan keprihatinan terhadap tindak kekerasan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh pemakai miras itu, tetapi secara politis menentukan solusi serta pemecahan masalahnya. Pemda Bulukumba dan dukungan politis badan legislatif (DPRD) menetapkan Perda No 03 Tahun 2003 tentang larangan, pengawasan penertiban peredaran, penjualan minuman beralkohol.²¹

Pada tahun 2002 di Kabupaten Bulukumba terjadi suatu kasus, ketika malam hari tiba anak muda berkumpul dan mabuk-mabukan yang dapat berujung pada tawuran. Miras pun menjadi konsumsi kelompok tertentu jika terdapat acara dangdutan di desa-desa, keberadaan tokoh agama dan pemerintah yang ditunjuk sebagai pengawas pelaksana Perda ini telah jarang terlihat dilokasi. Hanya karena Perda tentang minuman keras merupakan regulasi yang sifatnya umum secara upaya penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.²²

Pemerintah Bulukumba di samping menjadikan program penghayatan agama sebagai bidang utama dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD T.A 2003 (LPJ Bupati Bulukumb, 2003 : 11), juga menetapkan dan mengundang sejumlah peraturan daerah (Perda) yang dapat berkenaan dengan isu-isu agama baik yang bersifat lokal maupun nasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu menggali potensi lokal yang ada, salah satu potennsi yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat Bulukumba ialah

²¹H. A. Patabai Pabokori (67), Bupati Bulukumba periode 1995-2005, *wawancara* Makassar 23 Oktober 2018.

²²Amril Maryolo. AR, "Formalisasi syariat Islam di Bulukumba (Studi Tentang Peraturan Daerah keagamaan)" *Tesis* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN sunan Kalijaga 2017), h. 112.

dengan mengatur penerimaan *zakat, infaq dan shadaqah*. Dala rangka mewujudkan maksud diatas maka diperlukan peraturan yang legal dan resmi yakni peraturan daerah. Pertimbangan yang terurai diatas mendasari ditetapkan dan diundangkannya peraturan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 02 tahun 2003, tanggal 25 Agustus 2003 tentang pengelolaan zakat profesi, infaq dan shadaqah dalam kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil penghitungan zakat Kabupaten Bulukumba dapat disimpulkan bahwa daerah ini bisa hidup dari zakat meski hanya berkisar 30% dari potensi zakat. Oleh karena, pemerintah Kabupaten Bulukumba membentuk desa/kelurahan pelopor zakat disetiap kecamatan yang dapat dimandatkan mengelola zakat.²³

Diundangkan perda tersebut diatas memperlihatkan secara jelas adanya upaya Pemerintah Daerah Bulukumba menjadikan ajaran Islam yang sudah diatur dalam Syariat Islam menjadi hukum positif yang dapat berlaku secara formal dan legal.²⁴

Berpakaian atau berbusana merupakan isu yang paling aktual dan populer, bahkan isu busana tidak hanya menjadi isu nasional tetapi sudah menjadi isu internasional isu 3F yakni Food (makanan), Fun (Hiburan), Fashion (Mode) merupakan budaya lokal yang dapat melanda anggota masyarakat yang terdapat diatas permukaan bumi. Masyarakat kabupaten Bulukumba dalam kedudukannya sebagai masyarakat yang berbudaya tidak dapat menutup diri dari budaya 3F tersebut.

²³H. A. Patabai Pabokori (67), Bupati Bulukumba periode 1995-2005, *wawancara* Makaasar 23 Oktober 2018.

²⁴Anis K Al-Asyari Dkk. *Menapak Hari Esok Bulukumba Yang Lebih Baik*, (Cet. I ; Makassar: Perpustakaan Nasional, 2004), h. 184-185.

Corak serta model yang dapat ditawarkan oleh oleh budaya global yang sangat beragam, keragaman model serta corak tersebut menjadi symbol pemakaiannya. Model serta corak pemakainya itu menjadi indikator apa dan siapa pemakainya. Untuk maksud lebih meningkatkan ketakwaan serta keimanan masyarakat Kabupaten Bulukumba, maka pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba mengaturnya dan menetapkan serta mengundang PERDA Nomor 05 tahun 2003 tentang berpakaian Muslim dan muslimah dai Kabupaten Bulukumba.²⁵

Sebagaimana yang dapat terungkap dalam uraian diatas bahwa objek yang dapat diatur pada Perda adalah pakaian atau etika berpakaian. Etika berpakaian ataupun kewajiban berpakaian itu merupakan suatu ketentuan atau hukum yang dapat diatur oleh syariat Islam.

Namun perlu diketahui bahwa sebulum menerapkan aturan tentang busana muslim, maka yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah ialah bagaimana kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami nilai-nilai Islam tersubut.²⁶

Keharusan bahkan kewajiban pandai membaca Alquran atau pembedaan buta huruf Alquran merupakan suatu isu ulama, ini sudah menjadi suatu isu antar komunitas sejak awal kehadiran ummas Islam. Isu tersebut selanjutnya mengalami pasang surut di tengah masyarakat muslim, bebas but abaca Alquran kembali menghangat secara regional pasca peringatan Hardiknas tanggal 2 Mei 2003 di ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

²⁵Anis K Al-Asyari Dkk. Menapak Hari Esok Bulukumba Yang Lebih Baik, (Cet. I ; Makassar: Perpustakaan Nasional, 2004), h. 182-183.

²⁶Muhammada Nur Wahab (48), *wawanca* Buukumba 15 juli 2019.

Dalam waktu tiga bulan perjalanan gerakan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba memperkuatnya dengan PERDA Nomor 06 Tahun 2003 tentang pandai baca Alquran bagi siswa dan calon pengantin di Kabupaten Bulukumba yang dapat ditetapkan serta diundangkan pada tanggal 25 Agustus 2003.

Peraturan daerah yang dapat terurai di atas tampak sebagai kemauan politik pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yang berkeinginan keras agar supaya masyarakat kabupaten Bulukumba dapat hidup tertib serta teratur dalam mengamalkan ajaran Islam yang merupakan agama anutan mayoritas masyarakat Kabupaten Bulukumba.²⁷

Ada empat poin pertimbangan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba yang menjadi dasar ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 tentang pandai membaca Alquran bagi siswa serta calon pengantin di Kabupaten Bulukumba. Keempat poin tersebut diantaranya ialah:

1. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, serta mandiri dan penuh rasa tanggung jawab terhadap kemasyarakatan dan kebangsaan.
2. Pendidikan agama Islam di Indonesia sebagai subsistem pendidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang pendidikan

²⁷Anis K Al-Asyari Dkk. Menapak Hari Esok Bulukumba Yang Lebih Baik, (Cet. I ; Makassar: Perpustakaan Nasional, 2004), h.183-184.

nasional, bercita-cita untuk terwujudnya insan islami dan muslim paripurna yang dapat mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya.

3. Kemampuan baca Al-Quran bagi setiap murid sekolah dasar serta siswa sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas, merupakan suatu bagian dari pendidikan agama Islam yang dapat memiliki arti sebagai strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai iman dan taqwa bagi generasi muda serta masyarakat pada umumnya.
4. Untuk perwujudan maksud yang terdapat dalam dasar pertimbangan di atas, diperlukan adanya suatu aturan yang dapat mengatur tentang pandai baca Al-Quran bagi siswa dan calon pengantin. Kepandaian membaca Al-Quran menurut Peraturan Daerah (PERDA) ini, mempunyai fungsi yang sangat penting yakni sebagai wahana untuk menanamkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah swt. Bagi murid SD, siswa SLTP, SLTA dan calon pengantin, dan masyarakat dalam rangka membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah (psal 2).²⁸

Ada beberapa dampak yang terjadi pasca penetapan Peraturan Daerah (Perda) baca tulis Al Qur'an di tengah masyarakat Kabupaten Bulukumba. Setelah lima tahun penerapan, dapat diketahui bahwa jumlah Buta Aksara Al-Qur'an di kalangan penduduk Bulukumba mengalami penurunan sebanyak kurang lebih sebesar 5,5 %. Berikut ini angka santri yang telah menempuh pendidikan baca tulis Al Qur'an di tingkat kanak-kanak:

²⁸ Anis K Al-Asyari Dkk. Menapak Hari Esok Bulukumba Yang Lebih Baik, (Cet. I ; Makassar: Perpustakaan Nasional, 2004), h. 188.

Tabel Perkembangan Jumlah Santri Anak yang bisa baca tulis Al Qur'an
di Bulukumba dan Telah di Wisuda Tahun 2000 – 2005

No	Tahun	Jumlah Wisudawan		Jumlah	Ket.
		TKA	TPA		
1.	2000	1.130	2.125	3.255	
2.	2001	1.661	2.714	4.375	
3.	2002	2.542	3.633	6.175	
4.	2003	3.683	4.467	8.175	
5.	2004	3.730	6.326	10.056	
6.	2005	4.712	8.313	13.025	
		17.458	27.578	45.036	

Sumber: Humas Pemda Bulukumba, 2010.

Selain itu Humas Pemda Bulukumba melaporkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mempelajari, membaca, mendalami serta mengamalkan Al-Qur'an meningkat dengan berkembangnya TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an/TKA (Taman Kanak-kanak Al Qur'an) sebanyak 648 buah, Majelis Taklim 143 buah).²⁹

²⁹Syafuan Rozi dan Nina Andriana. Politik Kebangsaan dan Potret Perda Syariah Di Indonesia : Studi Kasus Bulukumba dan Cianjur. *Skripsi* (Jakarta : Peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI), h. 18.

Penetapan keempat peraturan daerah tersebut, oleh kalangan masyarakat Islam, dapat dipahami sebagai ekspresi kepekaan batin pemerintah daerah yang sangat besar terhadap aspirasi religius ditengah-tengah ummat. Bahkan sebagian masyarakat menilai kalau keempat peraturan daerah tersebut menjadi indicator adanya *political will* (basis keyakinan publik terhadap pemerintah), untuk menerapkan Syariat Islam di daerah ini. Apa yang dilakukan pemerintah tidak seberapa disebanding dengan tuntutan masyarakat Islam yang belum dapat terpenuhi.³⁰

Sosialisasi keempat Peraturan Daerah (PERDA) tersebut masih terus dilakukan dan secara umum mendapat tanggapan positif dari masyarakat Kabupaten Bulukumba. Meskipun sifatnya sosialisasi namun keempat Peraturan Daerah tersebut sebahagian besar sudah dilaksanakan ditengah masyarakat.

Untuk senantiasa mengawal kesinambungan secara konsisten pelaksanaan keempat Peraturan Daerah ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba menempu kebijakan yang strategis, sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan terhadap kelompok pengajian tradisional untuk dibina dalam bentuk pengajian dasar modern melalui TKA-TPA.
2. Memperketat kelembagaan BKPRMI Kabupaten Bulukumba sebagai pusat kegiatan pembinaan serta pengembangan TKA-TPA.
3. Memberikan bantuan pakaian wisuda (toga) TPA-TKA kepada para ketua BKPRMI.
4. Mengintruksikan pembentukan TKA-TPA serta majelis taklim yang dimulai dari tingkat kabupaten, kecamatan serta Desa.

³⁰Mahrus Andis. Mengawal Bulukumba Ke Gerbang Syariat Islam, (Sketsa Religius Bupati H. A. Patabai Pabokori). (Cet. I ; Makassar: Pustaka Refleksi 2014), h. 75.

5. Mengangkat tenaga guru mengaji menjadi pegawai kontrak serta dapat disebar disetiap TKA-TPA di seluruh Kecamatan.
6. Memasyarakatkan Al-Quran melalui pemberian hadiah tambahan berupa Al-Quran kepada pemenang lomba olahraga, seni dll.
7. Menyediakan anggaran bantuan pembinaan kegiatan “*Crash Program Keagamaan*” setiap tahun di dalam APBD.
8. Menjalin kerjasama dengan IAIN Alauddin Makassar melalui program Diploma II Instruktur Baca Tulis Al-Quran (IBTQ)
9. Membentuk organisasi remaja masjid di setiap masjid yang ada di Kabupaten Bulukumba serta menetapkan memberikan bantuan berupa baju seragam.
10. Memasyarakatkan pakaian muslim atau muslimat yang dimulai dari tingkat SD, SLTA, seta Perguruan Tinggi.
11. Mengadakan pengajian rutin di kantor Bupati Bulukumba.
12. Menetapkan hari jumat sebagai hari ibadah di Kabupaten Bulukumba.
13. Mengajukan pakaian Muslim atau muslimat bagi pegawai pada instansi pemerintah dan swasta.
14. Membentuk majelis taklim serta mengadakan pengajian rutin bagi para tukang becak.
15. Mengadakan pengajian rutin setiap bulan di pandopo rumah jabatan Bupati, dan dapat dihadiri para pejabat eksekutif dan legislative.
16. Membentuk majelis taklim mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten serta instansi-instansi pemerintah.

17. Bekerjasama dengan Depertemen Agama Kabupaten Bulukumba dalam rangka pembinaan baca Al-Quran untuk para Jamah Calon Haji.
18. Memprogramkan membawah para Tokoh-tokoh Agama untuk melaksanakan shalat tarwih di masjid AL Markasar Makassar disetiap bulan Ramadhan.
19. Pemberian penghargaan kepada Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat yang dinilai memiliki komitmen serta kontribusi terhadap pelaksanaan “Crash Program keagamaan”.
20. Menetapkan kebijakan mata Pelajaran Al-Quran sebagai muatan lokal di Sekolah Dasar (SD) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP).
21. Menyelenggarakan festival Anka Saleh serta Porseni Remaja Masjid di tingkat Kabupaten setiap tahun.
22. Membentuk Desa Binaan Muslim dan Desa Pelopor zakat di setiap Kecamatan, dan bekejasama dengan Perguruan Tinggi dan Organisasi Keagamaan selaku Pembina serta penanggung jawab kegiatan.
23. Menetapkan kebijakan Pandai Baca Tulis Al-Quran sebagai persyaratan bagi pemeluk agama Islam diantaranya:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Calon siswa SLTP, SLTA serta mahasiswa Perguruan Tinggi.
 - c. Pegawai yang akan naik pangkat atau golongan.
 - d. Calon Kepala Desa, Perangkat Desa serta Badan Perwakilan daerah
 - e. Pegawai yang akan dipromosikan menduduki jabatan structural maupun fungsional.
24. Membentuk Tim Pembina atau Pemantau Desa Binaan Muslim atau Pelopor Zakat Tingkat Kabupaten Bulukumba.

25. Melakukan pemantauan terhadap kemampuan Baca Al-Quran terhadap siswa baru di tingkat SLTP serta SMA atau SMK.
26. Membentuk Sekolah Model Islami di Tingkat TK, SD, SLTP serta SMA atau SMK.
27. Menghimbau secara terus menerus kepada masyarakat muslim atau muslimah, kelompok Olahraga dan seni (termasuk pemain Volley serta penyayi elekton) agar tetap berbusana Islami dalam setiap penampilan.
28. Melakukan evaluasi kemampuan Baca Al-Quran bagi calon pegawai serta pegawai yang akan dipromosi, baik pangkat ataupun jabatan.
29. Mengatur penggunaan busana muslimah bagi anggota PASKIBRAKA.
30. Menyelenggarakan Pelatihan calon Mubaligh atau Muballighat.
31. Mengaktifkan pembinaan serta pengelolaan sekolah Arab (diniyah).
32. Menyiapkan infrastruktur keagamaan, antara lain merintis pembangunan atau sarana kegiatan Islami, Islamic Center, Kantor BKPRMI dan Bazkab, serta monument “Crash Program Keagamaan”.
33. Menyelenggarakan Tabligh Akbar dengan menghadirkan mubaligh dari Jakarta, di antaranya K. H. Alifuddin Al Islamy, K. H. Muammar, Z. A serta Dra. Hj. Irene Handoko.
34. Melaksanakan Gerakan wakaf Al-Quran, busana muslim atau muslimah bagi pegawai, pengusaha, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat.
35. Memprogramkan pengangkatan sebagai Tenaga Kontrak bagi Hafidz atau Hafidzah Quran 30 juz.
36. Memprogramkan penyelenggaraan Lomba Sekolah Lingkungan Islami.

37. Memprogramkan pemberian bantuan dana operasional setiap tahun bagi pesantren pengelola kegiatan Hifzil Quran dan mitra Pemerintah Daerah.

Keterlibatan secara langsung Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam pembinaan serta pengembangan Syiar Islam, selain merupakan suatu amanah dari Allah swt selaku pemimpin di bumi ini, juga menjadi suatu komitmen kemasyarakatan untuk membangun kembali semangat keagamaan di tengah masyarakat Bulukumba. Berbagai prioritas kegiatan keagamaan yang dapat dilakukan selama ini, pada hakikatnya dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan keputusan yang arif bagi kondisi kerohanian masyarakat Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu, kehadiran “Crash Program Keagamaan” dengan keempat pilar Peraturan daerah tersebut menjadi cermin kesungguhan kita semua untuk mengawal kabupaten Bulukumba Ke Gerbang Syariat Islam.³¹

C. Hasil-Hasil Yang Dicapai Dalam Penerapan Perda Syariat Islam

Ada beberapa hasil yang dicapai dalam penerapan Perda Syariat Islam yaitu:

1. Terbentuknya Kelurahan Muslim

Pembentukan kelurahan muslim tersebut, sebagai wujud realiasi atas terbentuknya empat peraturan daerah berbasis syariah kala itu. Kelurahan yang berada sekitar 32 kilometer utara Kota Bulukumba itu, kini masih eksis mempertahankan nilai-nilai keagamaan. Bahkan, kelurahan ini dikenal sebagai pengorbit bibit-bibit tilawah terbaik di Di Bulukumba, bahkan di Sulawesi Selatan

³¹H. A. Patabai Pabokori (67), Bupati Bulukumba periode 1995-2005, *wawanca* Makassar 23 Oktober 2018.

(Sulsel). Seperti prestasi yang telah ditorehkan oleh Devi. Gadis kelahiran Ballasaraja itu tercatat sebagai runner up tilawah internasional tingkat anak, beberapa tahun lalu.

Terbentuknya kelurahan muslim, pada hakikatnya hanyalah suatu istilah yang secara sosiologis harus dipahami sebagai akumulasi dan implementasi nilai-nilai kultural masyarakat yang bernuansa Islam. Karena itu, kelurahan binaan muslim tidak mesti dipahami secara denotative sebagai wilayah eksklusif yang menutup pintu terhadap komunitas non muslim.

Bapak bupati H. A. Patabai Pabokori, dalam beberapa sambutannya sering menggambarkan dihadapan masyarakat bahwa prakarsa pembentukan kelurahan binaan muslim berawal dari keinginan masyarakat Bulukumba sendiri. Tujuannya bukan membangun sistem pengkotakan berdasarkan background keagamaan, melainkan sebagai wahana untuk merajut kebersamaan dan persaudaraan antar umat diatas landasan aqidah yang kuat seperti yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw ditengah-tengah masyarakat Madinah.

Bagi umat Islam sendiri, kelurahan binaan muslim dapat dipahami sebagai wilayah kultural religious yang diharapkan mampu mereintroduksi dan memproduksi secara maksimal nilai-nilai Islami melalui sikap serta perilaku seorang muslim yang taat melaksanakan perintah agama. Salah satu refleksi dari harapan itu Bupati Bulukumba sangat antusias merangsang kesadaran masyarakat agar kelurahan binaan muslim dijadikan sebagai kelurahan percontohan di Kabupaten Bulukumba.

2. Terbentuknya Kelurahan Pelopor Zakat

Bupati Bulukumba Patabai Pabokori yang menjadi pencetus perda syariat Islam di Kabupaten Bulukumba tahun 2003 menjelaskan bahwa salah satu alasan penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) pengelolaan zakat karena regulasi

sebelumnya belum mengatasi dan memaksimalkan potensi zakat. Pengelolaan zakat belum terarah dan terpadu. Aspek kerangka hukum, kebijakan, dan implementasi belum terlaksana dengan baik. Kondisi sebelum lahirnya perda tentang pengelolaan zakat profesi, infaq, dan shadaqah di Kabupaten Bulukumba tingkat kesadaran ummat Islam di Bulukumba memenuhi kewajiban membayar zakat, infaq dan shadaqah masih rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan potensi zakat Kabupaten Bulukumba adalah delapan kali lipat dari PAD (pendapatan asli daerah). PAD hanya Rp 12 miliar, sedangkan perhitungan potensi zakat hingga Rp 98 miliar. Daerah ini bisa hidup meski hanya 30 % dari potensi zakat. Tidak perlu pajak dan retribusi. Akhirnya kami membentuk kelurahan pelopor zakat di tiap Kecamatan yang diberi wewenang penuh mengelola zakat. Kunci dari pelaksanaan program pengelolaan zakat adalah komitmen pemimpin. Pemimpin menjadi contoh serta teladan, selain itu efektifitas pembayaran zakat bisa sukses dengan payung hukum maupun sanksi bagi mereka yang melanggar, serta salah satu kunci keberhasilan pengelolaan zakat adalah dengan secara transparansi.

Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba menjelaskan ada beberapa strategi penegakan perda zakat antara lain lewat sosialisasi di beberapa seminar lokal, membentuk kelurahan pelopor zakat (percontohan), serta pembentukan Unit Pengelola Zakat (UPZ) di masing-masing kelurahan dan instansi.

Lahirnya perda Nomor 2 Tahun 2003 tentang pengelolaan zakat serta terbentuknya kelurahan pelopor zakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, pegawai negeri, pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya membayar zakat, infaq serta shadaqah mengalami peningkatan pada masa Patabai Pabokori, dan dapat

menurun pada periode Bupati penggantinya. Pada masa Bupati Patabai Pabokori telah terbentuk 12 desa pelopor zakat atau kelurahan muslim, pemberian bantuan kepada siswa-siswi kurang mampu melalui BAZKAB, bantuan kepada sarana peribadatan, ekonomi lemah, TPA/ TKA dan madrasah.

3. Menurunnya tingkat Kriminalitas

Sebelum lahirnya perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang pengaturan minuman beralkohol, diceritakan adanya keadaan maraknya minuman keras (Miras) yang dapat beredar dikalangan masyarakat Kabupaten Bulukumba. Keadaan ketertiban dan keamanan dapat terganggu dengan banyaknya pemabuk yang melakukan tindakan perkelahian, pencurian, pembunuhan serta perjudian.

Pemerintah daerah beserta jajarannya seperti Satpol Pamompraja, dan Kesbangpolinmas melakukan upaya sosialisasi dan pendekatan persuasif terhadap pemuda pemakai miras serta penjual miras, termasuk jenis minuman lokal yang bernama *Ballo'* di Bulukumba, melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran perda, membentuk tim Buserda (Buru dan sergap daerah), melakukan operasi pengawasan dan penindakan Miras di lapangan, mengembangkan majelis taklim untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga Kabupaten Bulukumba. Pemberian bantuan modal usaha, untuk mengalihkan profesi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta membuka pengaduan bagi masyarakat tentang peredaran minuman keras sehingga bisa ditangani lebih lanjut.

Di Kabupaten Bulukumba sebelum memberlakukan ke empat Perda tersebut, 30% penduduk Kabupaten Bulukumba buta aksara Al-Quran, angka kriminalitas meningkat, kenakalan remaja serta penyimpangan sosial pun sangat tinggi. Namun setelah mencanagkan diri sebagai Kabupaten yang dapat menerapkan Perda Syariat

Islam, maka angka 30 persen tersebut secara drastis dapat didongkrak menjadi 100 persen masyarakat Bulukumba bisa baca Al-Quran.³²

Setelah pemberlakuan perda Nomor 3 Tahun 2002 ada kecenderungan indikasi positif secara bertahap sebagai implikasi sosial akibat adanya perda pengendalian minuman keras di Kabupaten Bulukumba, hasilnya ialah angka kejadian kejahatan yang dapat menjadi parameter tingkat kriminalitas cenderung menurun secara drastis sekitar 80 % antara kurung waktu 2002-2005.

Tabel data Kriminalitas di Kabupaten Bulukumba periode 2002-2005

No.	Jenis Tindakan Pidana yang Menonjol	2002	2003	2004	2005	Ket
1.	Pembunuhan	10	8	6	2	
2.	Penganiayaan Berat	8	11	5	-	
3.	Pencurian	78	75	27	3	
4.	Pemeriksaan	41	3	3	-	
5.	Nakortika	3	1	3	-	
6.	Pencurian Hewan	32	13	1	-	
7.	Perjudian	9	17	9	-	

³²H. A. Patabai Pabokori (67), Bupati Bulukumba periode 1995-2005, wawancara Makassar 23 Oktober 2018.

8.	Miras	25	17	14	6	
----	-------	----	----	----	---	--

Sumber Polda Bulukumba Tahun 2010.

Dengan lahirnya ke empat Perda tersebut membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap masyarakat Bulukumba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan Skripsi ini adalah:

1. Sebelum Islam masuk di Tiro (Bulukumba), rakyatnya masih menganut kepercayaan dari leluhur yaitu animisme dan dinamisme. Masyarakatnya masih meyakini kebiasaan lama yang percaya akan hal-hal mistis dan ilmu hitam, serta gemar minum minuman keras dan makanan haram. Setelah Islam masuk di Tiro kebiasaan lama sudah mulai ditinggalkan, Islamisasi di daerah ini dengan jalan damai, berbeda dengan beberapa kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, melalui jalan perang.
2. Melalui *Crash Program Keagamaan*, merupakan salah satu kebijakan pemerintah kabupaten Bulukumba di bawah pimpinan Patabai Pabokori untuk meramu religiusitas masyarakat Bulukumba agar menjadi modal dan semangat dalam pembangunan diberbagai sektor.
3. Hasil yang dicapai penerapan perda syariat Islam yakni terbentuknya kelurahan musim, terbentuknya kelurahan pelopor zakat maupun menurunnya tingkat kriminalitas.

B. Implikasi

Keterlibatan secara langsung Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam pembinaan serta pengembangan Syiar Islam, selain merupakan suatu amanah dari Allah swt selaku pemimpin di bumi ini, juga menjadi suatu komitmen kemasyarakatan untuk membangun kembali semangat keagamaan di tengah masyarakat Bulukumba.

Berbagai perioritas kegiatan keagamaan yang dapat dilakukan selama ini, pada hakikatnya darpat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan keputusan yang arif bagi kondisi kerohanian masyarakat Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu, kehadiran “Crash Program Keagamaan” dengan keempat pilar Peraturan daerah tersebut menjadi cermin kesungguhan kita semua untuk mengawal kabupaten Bulukumba Ke Gerbang Syariat Islam.

Sosialisasi keempat Peraturan Daerah (PERDA) tersebut masit terus dilakukan dan secara umum mendapat tanggapan positif dari masyarakat Kabupaten Bulukumba. Meskipun sifatnya sosialisasi namun keempat Peraturan Daerah tersebut sebahagian bessar sudah dilaksanakan ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Dudung, *Metode Penelitian Sejarah* Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Al-Ghazali Abu Hamid al-Ghazali *Ijtihad adalah “usaha keras yang dilakukan oleh mujtahid dalam mencari ketentuan-ketentuan hukum Syariat”*. Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fii Ilmi al-Ushul*, Bairut : Daar Ihya at-Turats al-Arabi, reprint Cetakan Mesir, 1324 H.
- Abdullah Sulaiman, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam*. Cet, 1; Jakarta : Pedomam Ilmu Jaya, 1996.
- Azra Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Cet.III ; Bandung : Mizan, 1995
- Abdullah Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : German Insani Press, 1994
- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Pembangunan Hukum Nasional : Suatu Analisa Terhadap RUU Peradilan Agama*
- Al-Asyari Anis K Dkk. *Menapak Hari Esok Bulukumba Yang Lebih Baik*, Cet.1; Makassar: Perpustakaan Nasional Andis Mahrus. *Mengawal Bulukumba Ke Gerbang Syariat Islam, (Sketsa Religius Bupati H. A. Patabai Pabokori)*. Cet. III ; Makassar: Pustaka Refleksi 2014
- AR Amril Maryolo., “*Formalisasi syariat Islam di Bulukumba (Studi Tentang Peraturan Daerah keagamaan)*” Tesis Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN sunan Kalijaga 2017
- Andriana Syafuan Rozi dan Nina. *Politik Kebangsaan dan Potret Perda Syariah Di Indonesia : Studi Kasus Bulukumba dan Cianjur*. Skripsi Jakarta : Peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI
- Bahtiar. *Islamisasi Di Tiro Bulukumba*. Jurnal “Al-Qalam”, Vol 18 no.2 Juli – Desember 2012
- Bek Asy-Syaikh Muhammad al-Khudhari, *Tarikh Tasyri al-Islami*, Bairut : Dar al-Fikr, 1988
- Gibb, H.A.R , *Mohammedanism*, New York : Oxford University Press, 1962
- Glasse Cyril , *Ensiklopedi Islam* Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002
- Huda Ni’matul, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewah, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus* Bandung: Nusa Media 2014
- H. M. Rasyidi, *Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi*. Cet.II ; Jakarta : Bulan Bintang, 1977
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulukumba
- <https://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-hukum-islam-menurut-rifyal.html>

- Hossein Seyyed Nasr, *Islam : Agama, Sejarah dan Peradaban* Risalah Gusti: Surabaya, 2003
- Iqmal Nur, "*Kerajaan Balanipa pada abad XVI-XVII*", *Skripsi* Makassar: fakultas Adab dan Humaniora, 2016
- Ittiba ialah sikap mengikuti suatu madzhab atau imam dengan suatu dasar mengetahui dasar hukumnya.*
- Ka'bah Rifyal, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* Cet. II ; Jakarta : Rifyal Ka'bah Foundation Publisher, 2016
- Karim M. Abdul, *Islam Nusantara* Cet.1; Yogyakarta: Pustaka Book Publisher
- Mannaungi Andi, "*Peranan Perda Syariat Islam Dalam Upaya Menanggulangi Perilaku Penyimpangan Remaja Di Kelurahan Borong Rappoa kabupaten Bulukumba*" *Skripsi* Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2013
- Ma'sa Lukman bin, "*Penerapan Syari'at Islam Melalui Peraturan Daerah*" *Studi Kasus Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan*". *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ilmu Dakwah Sekolah Tinggi Ilmu Da'wah (STID) Mohammad Natsir , 2007
- "Menentukan Fokus Penelitian", *Wrodpress.com*, <https:// wajburni. wordpress. com/2012/02/ 01/menentukan-fokus-penelitian/> 29 November 2016.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011
- Posha Beti yunardi. "*Perkembangan Islam Pasca Kemerdekaan*" *Historia* 3, no 2 (2015) *Perda Bernuansa Syariat Islam dan Implikasinya Terhadap Hubungan antar agama di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi-Selatan*), *Historia* Vol. 7 no.3 2006
- Pedoman Penulisan Skripsi. Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2016.*
- Pabokori H. A. Patabai. *Bupati Bulukumba periode 1995-2005*, wawancara oleh penulis, 23 Oktober 2018.
- Rahmat, dkk. *Buku Dasar Praktek Penelusuran Sumber Sejarah dan Budayah* Cet. 1; Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2012
- Retnowulandari Wahyuni, *Hukum Islam Dalm Tata Hukum Di Indonesia, Jakarta : Universitas Trisakti*, Cet. Pertama. 2010
- Rahman Fazlur, *Tema-tema Pokok al-Quran (terj) Anas Mahyudin* Bandung : Pustaka. 1983
- Salihima Syamsuez, "*Peta Politik di Sulawesi Selatan Pada Awal Islamisasi*", *Jurnal Rihlah* II, no.1 Mei 2015
- Rahman Fazlur, *Islam* Pustaka: Bandung, 1997

- Setiadi Elly M., dkk., *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya* Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011
- Siswoyo Rudi. “*Makalah Sumber Data dalam Penelitian Kualitatif*”. Gudang Ilmu.
<http://rudisiswoyo89.blogspot.co.id/2013/11/makalah-sumber-data-penelitian.html> 19 Oktober 2017
- Salam Solihin, *Sejarah Islam di Jawa*. Cet. I ; Jakarta : Jayamurni, 1964
- Siswoyo Rudi. “*Makalah Sumber Data dalam Penelitian Kualitatif*”. Gudang Ilmu.
<http://rudisiswoyo89.blogspot.co.id/2013/11/makalah-sumber-data-penelitian.html> 19 Oktober 2017
- Taklid ialah sikap mengikuti pendapat suatu madzhab tanpa berusaha mengetahui dasar hukumnya*
- Usman Suparman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. II ; Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002
- Warson Ahmad Munawwir, *al- Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* Pustaka Progressif: Surabaya, 2002
- Zein, Muhammad , ed., *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Sebuah pergulatan yang tak pernah tuntas*, Jakarta: Renaisan, 2005

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : B-922/A.I.1/TL.00/SK/UM/08/2019

**TENTANG
PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI
TAHUN 2019**

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan tanggal 9 Agustus 2019 perihal : Ujian Munaqasyah Skripsi a.n. : **MULIADI NIM. 40200113057 Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam dengan judul skripsi : PERKEMBANGAN ISLAM DI BULUKUMBA 2000-2005 (STUDI HISTORIS PENERAPAN PERDA SYARIAT ISLAM)**
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu membentuk panitia, pembimbing dan penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam penetapan Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai panitia, pembimbing dan penguji.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 293 tahun 2018 tentang Kalender Akademik tahun 2018/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia, Pembimbing dan Penguji Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
Ketua : H. Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
Sekretaris/Moderator : Dr. Abu Haif, M.Hum.
Pembimbing I : Dr. Rahmat, M.Pd.I.
Pembimbing II : Dr. Rahmawati, MA.
Penguji I : Dr. Wahyuddin G, M.Ag.
Penguji II : Dra. Hj. Surayah, M.Pd.
Pelaksana : Mubin Nasir, S.E.I.
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah Skripsi
Ketiga : Ujian Skripsi / Munaqasyah tersebut akan dilaksanakan pada hari / tanggal : **Kamis, 15 Agustus 2019, Jam 09.00 - 10.30 Wita, Ruang 209.**
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Gowa
Pada tanggal : 9 Agustus 2019



Dr. H. Barsihannor, M.Ag.
NIP. 19691012 199603 1 003

Dokumentasi



Bapak H. Andi Patabai Pabokori



Bapak Muhammad Nur Wahab

Daftar Nama-nama Informan

Nama : H. Andi. Patabai Pabokori
Umur : 67
Jabatan : Mantan Bupati Bulukumba (periode 1995-2005)
Alamat : Jl. Punggawa Makassar

Nama : Muhammad Nur Wahab
Umur : 48
Jabatan : Tokoh agama
Alamat : Tanete Kab. Bulukumba

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Muliadi
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Balleanging, 12 Desember 1993
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. Andi Tonro Makassar
E-mail : MuliadhyPhotography@yahoo.com

DATA ORANG TUA

Ayah : Bahtiar
Ibu : Hawise

RIWAYAT PENDIDIKAN :

2000-2006 : SDN 61 Balleanging
2006-2009 : MTsN 410 Tanete
2009-2012 : MAN 1 Bulukumba
2013-2019 : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

PENGALAMAN ORGANISASI

2013-2014 : Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah dan
Kebudayaan Islam (HIMASKI).
2013-2014 : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
2014-2015 : Wakil Ketua Umum HIMASKI
2015-2016 : Sekertaris Umum UKM KSR PMI Unit 107 UIN
Alauddin Makassar
2016-2018 : Ketua Umum IKAMANTA (Ikatan Alumni MAN
Tanete) Bulukumba
2018-2019 : Ketua Bidang Pendidikan Gowa Project (GP)

Samata-Gowa, 14 Maret 2019

\

Muliadi

NIM. 40200113057